

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN**

### **URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintahan Daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Lingkungan Hidup
4. Pekerjaan Umum
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perumahan
8. Kepemudaan dan Olah Raga

9. Penanaman Modal
10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11. Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Ketenagakerjaan
13. Ketahanan Pangan
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Keluarga Berencana
16. Perhubungan
17. Komunikasi dan Informatika
18. Pertanahan
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Sosial
23. Kebudayaan
24. Statistik
25. Kearsipan
26. Perpustakaan

Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Pariwisata
6. Industri
7. Perdagangan
8. Ketransmigrasian

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berikut diuraikan capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur yang meliputi Urusan Wajib

dan Urusan Pilihan dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan 5 (Lima) Misi Pembangunan.

**Tabel 4.1**  
**Matriks Penyelenggaraan Urusan Wajib**  
**dan Urusan Pilihan di Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2017	PELAKSANA URUSAN WAJIB	PELAKSANA URUSAN PILIHAN
<b>Misi 1 :</b> Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi	<b>Prioritas 1 :</b> Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pendidikan &amp; Kebudayaan</li> <li>Dinas Perpustakaan &amp; Kearsipan Daerah</li> <li>Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak</li> </ul>	-
	<b>Prioritas 2 :</b> Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>RSUD AW. Sjahranie</li> <li>RSUD Kanujoso</li> <li>RSJD Atma Husada</li> </ul>	-
	<b>Prioritas 5 :</b> Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi</li> <li>Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak</li> </ul>	-
<b>Misi 2 :</b> Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan	<b>Prioritas 3 :</b> Percepatan Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemberdayaan Masyarakat &amp; Pemerintahan Desa</li> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>Dinas Pendidikan &amp; Kebudayaan</li> <li>Dinas Sosial</li> <li>Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum (Cipta Karya)</li> <li>Dinas Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi (Ketenagakerjaan)</li> <li>Biro Perekonomian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kehutanan</li> <li>Dinas Pangan Tanaman Pangan &amp; Hortikultura</li> <li>Dinas Peternakan &amp; Kesehatan Hewan</li> </ul>
	<b>Prioritas 4 :</b> Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi</li> <li>Disperindagkop(UMKM dan Koperasi)</li> <li>Dinas Pemuda dan Olahraga</li> <li>Dinas Sosial</li> </ul>	-
	<b>Prioritas 5 :</b> Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda</li> <li>Biro Perekonomian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disperindagkop (perdagangan dan industri)</li> </ul>

MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2017	PELAKSANA URUSAN WAJIB	PELAKSANA URUSAN PILIHAN
	<b>Prioritas 6 :</b> Percepatan Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Penanaman Modal &amp; Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Peternakan &amp; Kesehatan Hewan</li> <li>Dinas Perkebunan</li> <li>Dinas Pariwisata</li> <li>Dinas Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi (Transmigrasi)</li> <li>Disperindagkop (perdagangan dan industri)</li> </ul>
	<b>Prioritas 7 :</b> Pengembangan Agribisnis	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Peternakan &amp; Kesehatan Hewan</li> <li>Dinas Perkebunan</li> <li>Dinas Kelautan &amp; Perikanan</li> <li>Disperindagkop (industri)</li> </ul>
	<b>Prioritas 8 :</b> Peningkatan Produksi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pangan Tanaman Pangan &amp; Hortikultura</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Sumber Daya Air)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pangan Tanaman Pangan &amp; Hortikultura</li> <li>Dinas Peternakan &amp; Kesehatan Hewan</li> <li>Dinas Kelautan &amp; Perikanan</li> <li>Dinas Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi (Transmigrasi)</li> </ul>
	<b>Prioritas 9 :</b> Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Energi &amp; Sumber Daya Mineral</li> <li>Dinas Peternakan &amp; Kesehatan Hewan</li> </ul>
<b>Misi 3 :</b> Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata	<b>Prioritas 10 :</b> Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>Dinas Perhubungan</li> <li>Diskominfo</li> </ul>	-
<b>Misi 4 :</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik	<b>Prioritas 11 :</b> Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biro Organisasi</li> <li>Inspektorat</li> <li>Badan Pengelolaan Keuangan &amp; Aset Daerah</li> <li>Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>Diskominfo</li> <li>Bappeda</li> <li>Bakesbangpol</li> </ul>	-
<b>Misi 5 :</b> Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim	<b>Prioritas 12:</b> Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum (Penataan Ruang)</li> <li>Bappeda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kehutanan</li> <li>Dinas Energi &amp; Sumber Daya Mineral</li> <li>Dinas Perkebunan</li> </ul>

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

## **A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Dilaksanakan**

### **Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi**

Misi pertama ini dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan yaitu “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim” dan 5 (lima) sasaran yaitu (1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Meningkatkan Angka Melek Huruf, (3) Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, (4) Meningkatnya Angka Harapan Hidup, (5) Meningkatnya Pendapatan Perkapita.

Capaian sasaran tujuan pada misi pertama yaitu Meningkatkan kualitas SDM Kaltim sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya yang ditandai dengan realisasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu dari 74,17 pada tahun 2016 menjadi 74,59 pada tahun 2017.

Dari empat komposit pembentuk IPM yaitu 1) angka melek huruf, 2) rata-rata lama sekolah, 3) angka harapan hidup, dan 4) pendapatan per kapita, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

- Komposit pertama dan kedua dari IPM yaitu angka melek huruf yang ditargetkan pada tahun 2017 sebesar 98,80 % dengan realisasi sebesar 98,60 % dapat dikatakan telah tercapai (status on track). Untuk rata-rata lama sekolah di tahun 2017 realisasi mencapai 9,24 tahun dari target 11,50 tahun atau belum mencapai target (status on track). Hal ini disebabkan kondisi daerah di Kalimantan Timur terdiri dari daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil yang belum dapat mengakses pelayanan pendidikan karena keterbatasan transportasi, informasi, komunikasi dan minimnya tenaga pendidik yang berminat tinggal di daerah tersebut. Begitu juga dengan daya tampung sekolah negeri di daerah pedalaman/pedesaan jumlah pendaftar sekolah lebih besar daripada daya tampung sekolah, dikarenakan kekurangan Ruang Kelas Baru (RKB) sehingga menyebabkan siswa tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian juga untuk sekolah swasta di daerah pedalaman/pedesaan belum banyak yang berdiri akibatnya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan putus sekolah. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk

menyekolahkan anaknya, sehingga anak cenderung ikut membantu pekerjaan orang tuanya.

- Komposit ketiga dari IPM yaitu Angka Harapan Hidup pada tahun 2017 ditargetkan 73,85 tahun dengan realisasi sebesar 73,68 tahun, atau telah sesuai dengan target (status on track). Demikian juga untuk komposit keempat dari IPM yaitu Pendapatan Perkapita dengan target tahun 2017 sebesar Rp. 52,65 juta dan realisasi sebesar Rp. 50,65 juta. Meskipun belum melampaui target, pencapaian terhadap target pendapatan perkapita tersebut masih berada pada status on track.

**Tabel 4.2**  
**Capaian Sasaran Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD 2017	CAPAIAN 2017	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,08	74,59	On Track/ Tercapai	
2.	Angka Melek Huruf (persen)	98,80	98,60	On Track/ Tercapai	
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,50	9,62	On Track/ Tercapai	
4.	Angka Harapan Hidup (tahun)	73,85	73,68	On Track/ Tercapai	
5.	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)	Rp 52,65 juta	Rp 50,65 juta	On Track/ Tercapai	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD Kalimantan Timur TA 2013-2018, dan BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Upaya pencapaian target misi Pertama ini ditempuh melalui **Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan; Prioritas 2: Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; dan Prioritas 5: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**. Secara umum capaian kinerja untuk misi pertama telah mencapai target yang telah ditetapkan.

## 1.1. Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

### 1.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

#### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 1: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan melalui 11 program dan 41 kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp.389,939 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah angka melek huruf sebesar 98,60% dari target 98,80% dan rata-rata lama sekolah 9,62 tahun yang belum mencapai target 11,50 tahun. Namun pencapaian tersebut masih berada pada status on track.

**Tabel 4.3**  
**Program Kegiatan Prioritas 1**  
**Terkait Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan**

PRIORITAS 1 : PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN			
NO		PROGRAM / KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
1	Program pendidikan non formal		Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)		
3	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun		
4	Program pendidikan menengah		
5	Program peningkatan pendidikan dan pengembangan sumber daya masyarakat		
	5.1	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	
6	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		
	6.1	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	
	6.2	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	
	6.3	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	

PRIORITAS 1 : PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN			
NO		PROGRAM / KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
	6.4	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	
7		<b>Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan</b>	<b>Dinas Perpustakaan &amp; Kearsipan Daerah</b>
8		<b>Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak</b>	<b>Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak</b>
	8.1	Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

#### b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan” pada tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 95,76% dan realisasi fisik 99,66%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian peningkatan mutu pendidikan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Non Formal, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Pada tahun 2017, program ini direvisi dan pelaksanaannya dialihkan menjadi program pendidikan luar biasa melalui kegiatan rehab dan pengecoran lingkungan sekolah, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa berupa kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), olimpiade sains, dan kreatifitas siswa.

2. Program Pendidikan Menengah.

Pada tahun 2017, program ini direvisi menjadi :

- a. Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan melalui kegiatan :

- Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah berupa Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sebanyak 106 orang dan kegiatan Festival Lomba Seni Nasional (FLSN) sebanyak 100 orang;
  - Pembangunan ruang kelas baru, rehab dan pengecoran lingkungan sekolah, Pengadaan Alat Pembelajaran Multimedia Berbasis IT, pengadaan alat praktik dan peraga siswa jurusan nautik kapal penangkap ikan, pengolahan hasil pertanian, agribisnis pembibitan tanaman dan kultur jaringan, teknik otomotif kendaraan ringan, BOSNAS SMK sebanyak 26.762 siswa, pembangunan ruang praktek siswa SMK di 7 sekolah.
- b. Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas melalui kegiatan :
- Pengadaan lab bahasa, pengadaan alat pembelajaran multimedia berbasis IT, paket C setara SMU sebanyak 3.743 siswa, penghargaan siswa berprestasi SMA PASIAD, luar negeri dan dalam negeri sebanyak 44 siswa, pembangunan ruang kelas baru, rehab dan pengecoran lingkungan sekolah, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, BOSNAS SMA sebanyak 58.007 siswa, rehab ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru di 11 sekolah, pembangunan laboratorium di 3 sekolah.
3. Program peningkatan pendidikan dan pengembangan sumber daya masyarakat melalui kegiatan peningkatan pendidikan dan pengembangan SDM berupa pemberian beasiswa kepada 992 siswa.
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui kegiatan :

- a. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi kepada 700 guru.
  - b. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan kepada 300 guru.
  - c. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan kepada 100 guru.
- 5. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (kegiatan kualifikasi pendidikan guru) kepada 200 guru kualifikasi pendidikan S1/S2.
  - 6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Pada tahun 2017, program ini direvisi menjadi :

- a. Program pengembangan perpustakaan, kearsipan, dan kebudayaan kegemaran membaca yang dijalankan melalui kegiatan akreditasi perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus sebanyak 8 unit perpustakaan; Penyelenggaraan dan pemberian Nomor Pokok Perpustakaan sebanyak 100 untuk perpustakaan; Pemberian panji panji keberhasilan pembangunan di bidang perpustakaan dan Minat Baca; Penghimpunan Pedoman Norma Standar Prosedure Kreteria; Tersedianya Data perpustakaan se-Kalimantan Timur sebanyak 2.611 unit; Pemilihan Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan terbaik tingkat Provinsi; Pemilihan perpustakaan Sekolah Menengah Atas terbaik tingkat Provinsi; Pendataan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan se-Kalimantan Timur; Terselenggaranya Sosialisasi Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Penyesuaian/Inpassing sebanyak 105 peserta; Terlaksananya Penyuluhan Kurikulum Pedoman Penyelenggaraan Diklat Perpustakaan sebanyak 33

orang; Pemilihan Pustakawan berprestasi terbaik tingkat Provinsi se-Kalimantan Timur yang selanjutnya diikuti sertakan pada lomba sejenis di tingkat nasional; Memfasilitasi tes Uji kompetensi Infassing Jabatan pustakawan sebanyak 20 orang; Memfasilitasi pengangkatan jabatan fungsional Pustakawan melalui jalur infassing sebanyak 1 orang; Terlaksananya workshop speed reading dengan jumlah peserta 30 orang; Terlaksananya Pemasyarakatan/sosialisasi Minat Baca; Terlaksananya lomba bercerita terbaik tingkat provinsi yang selanjutnya diikuti sertakan pada lomba sejenis di tingkat Nasional; Terlaksananya rapat koordinasi bersama Pengurus GPMB se-Kalimantan Timur; Terlaksananya Rakor Pengembangan Perpustakaan se-Kalimantan Timur; Terlaksananya Lomba Mengarang/Resensi buku tingkat Provinsi se-Kalimantan Timur;

- b. Program Peningkatan Layanan, otomasi dan Kerjasama Perpustakaan melalui kegiatan Pengembangan layanan Perpustakaan mencakup Pelaksanaan kegiatan Peningkatan jam layanan Perpustakaan (penambahan jam layanan perpustakaan diluar jam kerja); Revisi Dokumen ISO 9001 : 2008 Ke ISO 9001 : 2015; Pelaksanaan Perpustakaan Keliling menggunakan Armada Mobil Keliling pada 21 titik lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh Perpustakaan; Pengembangan bandwidth internet guna memudahkan pemustaka mencari bahan pustaka , referensi atau literature yang dibutuhkan.
- c. Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan melalui Pengadaan bahan pustaka sebanyak 1.500 eksemplar atau sebanyak 169 judul buku; Pengolahan bahan pustaka

sebanyak 1.500 eksemplar serta alih media koleksi sebanyak 30 judul.

- d. Program Pengawasan Kearsipan melalui kegiatan pengawasan internal, eksternal serta supervise dan pengawasan BUMD perusahaan, ormas dan tokoh masyarakat, kasil pelaksanaan berupa Terlaksananya Rakor Perpustakaan dan Kearsipan; Terlaksananya sosialisasi LKD Kab/Kota, serta Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Kearsipan.
  - e. Program Pengelolaan Arsip melalui kegiatan Akuisisi dan pengelolaan arsip, pemeliharaan dan pelestarian arsip serta peningkatan kualitas layanan kearsipan hasil yang di capai melauai kegiatan sosialisasi sada kearsipan yang di ikuti oleh 100 peserta serta promosi kearsipan melalui penyelenggaraan pameran pameran.
7. Program Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, melalui kegiatan Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak berupa pemetaan anak putus sekolah dan tidak pernah sekolah yang dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten/Kota (Paser, PPU, Balikpapan, Samarinda dan Bontang).

### **1.1.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Kurangnya tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (TU, laboran, arsiparis, satpam, dll) yang berstatus PNS.
2. Adanya tenaga kependidikan non pns yang masih berijazah SD.
3. Gaji Non PNS untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih dibawah UMR.
4. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS yang bertambah jumlah personilnya tidak diimbangi dengan jumlah anggaran untuk keperluan pembayaran gaji.

5. Masih terdapat beberapa gedung sekolah menengah yang belum selesai pembangunannya.
6. Masih terdapat beberapa sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah/lahan.
7. Masih terdapat beberapa sekolah yang bangunannya menjadi satu antara sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama.
8. Terdapat 11 sekolah SMA/SMK/SLB yang hanya memiliki satu orang PNS yaitu Kepala Sekolah, antara lain :
  - Kabupaten Kutai Barat terdapat 2 Sekolah yaitu SMAN 1 Nyuatan dan SMAN 1 Damai;
  - Kabupaten Kutai Timur terdapat 2 Sekolah yaitu SMKN 1 Rantau Pulung dan SMKN 2 Sangkulirang;
  - Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 7 Sekolah yaitu SMAN 1 Kenohan, SMKN 1 Anggana, SMKN 1 Loa Janan, SMKN 1 Muara Jawa, SMKN 1 Kembang Janggut, SMKN 1 Tenggarong Seberang dan SMKN 2 Sebulu.
9. Kurangnya ruang kelas baru (RKB) yang berakibat sekolah menolak peserta didik.
10. Jarak sekolah dengan ibukota Provinsi yang jauh berakibat guru disekolah tersebut kesulitan dalam pengurusan kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, dan sebagainya.
11. Kewajiban administrasi di sekolah sama dengan di Perangkat Daerah, akan tetapi masih kurang sosialisasi atau bimbingan teknis di sekolah yang berkaitan dengan administrasi seperti aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIKAP, TEPRA, Bridgesys.
12. Dihapusnya program PAUD, program pendidikan non formal, program pendidikan dasar karena bukan kewenangan provinsi akan tetapi untuk kejuaraan/lomba di

tingkat nasional, dilakukan perlombaan dengan jenjang Kabupaten/Kota, Provinsi.

13. Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan hak anak.
14. Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki database informasi tentang data anak seperti anak putus sekolah, pekerja anak, dan lain-lain.

**b. Solusi**

1. Mengangkat tenaga kontrak non pns tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (TU, Laboran, Arsiparis, Satpam, dll) menjadi PNS.
2. Adanya tenaga kependidikan non pns yang masih berijazah SD disarankan untuk mengikuti program paket c.
3. Gaji Non PNS untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih dibawah UMR, disarankan agar sekolah menambahkan gaji tersebut melalui dana BOSDA.
4. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS yang bertambah jumlah personilnya tidak sesuai dengan jumlah anggaran untuk keperluan pembayaran gaji, oleh karena itu diusulkan kepada Tim Anggaran untuk penambahan gaji tersebut.
5. Mengusulkan kepada tim anggaran untuk melakukan penyelesaian gedung sekolah yang belum terselesaikan.
6. Mengusulkan dana untuk pengurusan sertifikat tanah/lahan sekolah.
7. Mengusulkan pembangunan sekolah baru untuk mengatasi sekolah yang masih tergabung antara sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama.
8. Distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus PNS ke sekolah yang kekurangan pegawai PNS dan mengadakan pengangkatan PNS.

9. Mengusulkan ruang kelas baru (RKB) kepada Pemerintah Daerah dan Pusat.
10. Pembangunan jaringan komunikasi di daerah terpencil untuk mendukung kemudahan mendapatkan informasi dan pengupdate-an data sekolah.
11. Perlu dibentuk posko pengaduan anak putus sekolah di Kabupaten/Kota guna pemenuhan hak anak di bidang pendidikan.
12. Perlunya dilakukan pemetaan anak putus sekolah secara berkala.
13. Perangkat Daerah pengampu urusan anak khususnya mengenai anak putus sekolah harus mendapat kejelasan siapa yang berhak menanganinya.

## **1.2. Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan**

Komposit IPM selanjutnya adalah bidang kesehatan yang ditunjukkan dengan angka harapan hidup tahun 2017 mencapai 73,68 tahun dari target 73,85 tahun atau dapat dikatakan telah sesuai dengan target (status on track). Kedepannya, Pemerintah Daerah akan terus berkomitmen dalam peningkatan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat guna mencapai angka harapan hidup yang layak dan ditargetkan.

### **1.2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

#### **a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 2: Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dilaksanakan melalui 4 program dan 5 kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp.2,22 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah angka harapan hidup 73,68 tahun dari target 73,85 tahun.

**Tabel 4.4**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait**  
**Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan**

PRIORITAS 2 : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN			
NO		PROGRAM / KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
1	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		RSJD Atma Husada Mahakam
	1.1	Penyuluhan kesehatan jiwa dan narkoba	
2	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		RSUD Kanujoso
	2.1	Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter dan paramedis	
3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Dinas Kesehatan
4	Program standarisasi pelayanan kesehatan		RSUD Kanujoso
	4.1	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	
5	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin		Dinas Kesehatan

*Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017*

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan” pada tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 93,32% dan realisasi fisik 93,35%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian peningkatan kualitas layanan kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan penyuluhan kesehatan jiwa dan narkoba melalui kegiatan penyuluhan dan publikasi kesehatan jiwa dan narkoba melalui media elektronik, media cetak/koran maupun secara langsung ke masyarakat.
2. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, melalui kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis berupa kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dokter dan paramedis dengan sasaran peningkatan kualitas dokter terkait dengan permasalahan obesitas, peningkatan kualitas dokter berupa training

bantuan hidup dasar dan penanganan stroke dengan metode baru, dan kerjasama dengan dokter bedah jantung RS Harapan Kita.

3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan program pelayanan kesehatan penduduk miskin.

Pada tahun 2017, program ini direvisi dan pelaksanaannya dialihkan menjadi program obat dan perbekalan kesehatan melalui kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebanyak 150 jenis obat.

4. Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan melalui kegiatan review berkala akreditasi bagi rumah sakit umum daerah Provinsi, serta perbaikan mutu layanan laboratorium kesehatan daerah dengan menghasilkan sertifikat akreditasi laboratorium.

### **1.2.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal karena keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan terutama dalam pemanfaatan informasi teknologi untuk publikasi dan promosi.
2. Pada tahun 2017 untuk Dinas Kesehatan Provinsi program kegiatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagian besar dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi dari Pusat.

#### **b. Solusi**

1. Perlu dilakukan penambahan SDM tetap (ASN) yang berkompeten terutama dalam pemanfaatan dan pengembangan informasi teknologi untuk menunjang publikasi dan promosi.

2. Mendorong inovasi Perangkat Daerah dalam menunjang pencapaian target-target kesehatan dan dukungan dari seluruh pihak dalam upaya penyelesaian masalah kesehatan.

### 1.3. Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan merupakan salah satu komponen upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, yang diukur melalui peningkatan pendapatan perkapita.

Sasaran prioritas ini meliputi; meningkatnya pendapatan perkapita dan meningkatnya daya beli masyarakat. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak terlepas dari adanya peningkatan komposit daya beli masyarakat melalui pendapatan perkapita yang telah mencapai Rp. 50,65 juta dari target Rp. 52,65 juta. Meskipun belum melampaui target, namun pencapaian tersebut masih berada pada status on track.

#### 1.3.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

##### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 5: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dilaksanakan melalui 3 program dan 5 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,949 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah pendapatan per kapita Rp 50,65 juta belum melampaui target Rp 52,65 juta, namun masih berada pada status on track.

**Tabel 4.5.**  
**Program Kegiatan Prioritas**  
**Terkait Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

<b>PRIORITAS 5 : PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN</b>			
<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>		<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>		<b>Dinas Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi</b>
	<b>1.1</b>	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	

	1.2	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	
2	<b>Program Peningkatan Pembinaan &amp; Pengawasan Ketenagakerjaan</b>		
	2.1	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	2.2	Pembinaan Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan pada Pemberi Pekerja dan Pekerja	
3	<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>		<b>Dinas Kepedudukan Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak</b>
	3.1	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” pada tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 97,78% dan realisasi fisik 100%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian pengembangan ekonomi kerakyatan, adalah sebagai berikut :

1. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, melalui kegiatan :
  - Pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja berupa bakti sosial dalam rangka May Day sebanyak 150 pekerja.
  - Peningkatan fungsi lembaga ketenagakerjaan berupa optimalnya kinerja lembaga ketenagakerjaan sebanyak 3 lembaga ketenagakerjaan yaitu Tripartit, Bipartit, dan Dewan Pengupahan.
2. Program peningkatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, melalui kegiatan :

- Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 60 perusahaan yang dibina dan diawasi.
  - Pembinaan penerapan peraturan ketenagakerjaan pada pemberi pekerja dan pekerja terhadap 100 perusahaan yang dibina.
3. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, melalui kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha berupa jumlah peserta yang mengikuti bimbingan usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha sebanyak 50 orang.

### **1.3.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Belum adanya kebijakan khusus terkait pengembangan industri rumahan.
2. Belum optimalnya pembinaan pendampingan bagi pelaku industri rumahan dari Pemerintah terkait kelangsungan produksi dan pemasaran.
3. Produksi industri rumahan belum memiliki daya saing karena beberapa kendala terkait syarat kualitas SDM dan keterbatasan teknologi tepat guna.
4. Masih minimnya minat dan ketertarikan perempuan untuk menjalankan dan mengelola usaha dikarenakan keterbatasan modal, kompetensi dan informasi.

#### **b. Solusi**

1. Melaksanakan inventarisasi dan sertifikasi industri rumahan.
2. Membangun komitmen dengan dunia usaha untuk kemudahan pemasaran.

3. Peningkatan kualitas pelaku industri rumahan terutama kaum perempuan, melalui pelatihan dan bimbingan teknis keahlian.
4. Mengoptimalkan peran lembaga permodalan, pelatihan dan penyebarluasan informasi untuk meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam menjalankan dan mengelola usaha.

**Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan**











Misi kedua “Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan” menekankan pada dua tujuan yaitu “Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat” dengan sasaran 1) Menurunnya tingkat kemiskinan, 2) Menurunnya Indeks Gini, 3) Menurunnya tingkat pengangguran, 4) Meningkatnya daya beli masyarakat dan tujuan kedua yaitu “meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau” dengan sasaran 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas, 2) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, 3) Tercapainya swasembada beras, 4) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.

Capaian indikator makro pembangunan dalam rangka menurunkan angka pengangguran pada tahun 2017, telah mencapai 6,91% yang menunjukkan perbaikan dibanding capaian pada tahun 2016 yaitu 7,95%. Sedangkan capaian indikator pembangunan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur mencapai angka 6,19% dari target sebesar 6,10% pada tahun 2017. Pencapaian tersebut telah berada pada status on track.

Pelaksanaan Misi 2 pembangunan di Kalimantan Timur dijabarkan melalui upaya pencapaian Prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan; Prioritas 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan; Prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi; Prioritas 7 : Pengembangan

Agribisnis; Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan dan Prioritas 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan.

**Tabel 4.6.**  
**Capaian Sasaran Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumberdaya Alam dan Energi Terbarukan**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2017	CAPAIAN TAHUN 2017	STATUS CAPAIAN	
1	Tingkat Kemiskinan	6,10 %	6,19 %	On Track/ Tercapai	
2	Tingkat Pengangguran	7,18 %	6,91 %	On Track/ Tercapai	
3	Tingkat Inflasi	4 $\pm$ 1	3,15 %	On Track/ Tercapai	
4	Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity)	11.600	11.355 (akhir tahun 2016)	Data sudah tidak dirilis oleh BPS	
5	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,32	0,33	On Track/ Tercapai	
6	Pertumbuhan Ekonomi				
	- Migas	0,5 $\pm$ 1	3,13	On Track/ Tercapai	
	- Non Migas	1 $\pm$ 1	4,04	On Track/ Tercapai	
	- Non Migas & Non Batubara	4 $\pm$ 1	5,24	On Track/ Tercapai	
7	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	9 %	7,96 %	On Track/ Tercapai	
8	Rasio Pemenuhan Beras	75	61,52	On Track/ Tercapai	
9	Bauran Energi baru terbarukan	2	1,38	On Track/ Tercapai	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Evaluasi Tahun Keempat RPJMD Kalimantan Timur TA 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

## 2.1. Prioritas 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan

### 2.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

#### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan melalui 7 program dan 11 kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp.22,008 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah tingkat kemiskinan sebesar 6,19% dari target sebesar 6,10%, atau berada pada status on track.

**Tabel 4.7**  
**Program Kegiatan Prioritas**  
**terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan**

Prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan			
No		Program / Kegiatan	PERANGKAT DAERAH
1	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1.1	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)		
1.2	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi		
2	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG KESEHATAN		DINAS KESEHATAN
3	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BID. KESEJAHTERAAN SOSIAL UTK MENGUKUR INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN		DINAS SOSIAL
3.1	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan		
3.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS		
3.3	pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya		
4	PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN)		BIRO PEREKONOMIAN
5	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &

	5.1	Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	<b>PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>		<b>DINAS SOSIAL</b>
	6.1	pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &amp; PERLINDUNGAN ANAK</b>
	7.1	Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG KETENAGAKERJAAN</b>		<b>DINAS TENAGA KERJA &amp; TRANSMIGRASI</b>
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	9.1	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	
	9.2	Pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Percepatan Pengentasan Kemiskinan” pada tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 95,57% dan realisasi fisik 96,91%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian percepatan pengentasan kemiskinan, adalah sebagai berikut :

1. Program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, melalui kegiatan :
  - Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA) kepada 1.370 siswa.
  - Pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi kepada 632 orang.
2. Program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan.

Program ini pada tahun 2016 dilaksanakan melalui UPTD Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) dimana program ini dilaksanakan untuk mengcover pembiayaan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kalimantan Timur yang belum tercover di BPJS. Penyelenggaraan Jamkesprov Kaltim pada tahun 2017 tidak berlaku lagi dan hanya menyelesaikan pembayaran klaim tahun 2016.

3. Program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial untuk mengurangi indeks kedalaman kemiskinan, melalui kegiatan :

- Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan berupa pengadaan bantuan kepada 50 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
- Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS berupa pemberian alat bantu lanjut usia; Pemberian permakanan gizi bagi lanjut usia terlantar.
- Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya berupa bimbingan teknis bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan output pemetaan wilayah Komunitas Adat Terpencil (KAT).

4. Program beras untuk keluarga miskin (RASKIN).

Pada tahun 2017, program ini telah direvisi menjadi kegiatan pada program peningkatan sinergi kebijakan ekonomi daerah yang pelaksanaannya berupa koordinasi dalam rangka pendistribusian Raskin ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dengan realisasi pendistribusian beras sejahtera sebanyak 20.231.280 Kg.

5. Program penanggulangan kemiskinan bidang pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna berupa penguatan

kelembagaan masyarakat dan pemdes, usaha ekonomi masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat kepada sebanyak 3.360 jiwa masyarakat miskin dari target 3.888 jiwa masyarakat miskin di 15 posyantek percontohan yang dibina.

6. Program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial, melalui kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya berupa pengadaan bantuan usaha ekonomi produktif kegiatan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Samarinda dan Bontang kepada 30 orang dan 36 Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
7. Program penanggulangan kemiskinan bidang pemberdayaan perempuan, melalui kegiatan peningkatan kewirausahaan kepada 30 orang perempuan di pedesaan.
8. Program penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan yang pada tahun 2016 dijalankan melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja dengan padat karya, pada tahun 2017 ini pelaksanaannya dialihkan pada program peningkatan kesempatan kerja yang berada pada prioritas 4.
9. Program penanggulangan kemiskinan bidang sarana dan prasarana dasar permukiman, melalui kegiatan :
  - Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dalam bentuk :
    - a. Bantuan perbaikan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 62 unit rumah di Kota Samarinda.
    - b. Identifikasi bantuan perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Samarinda.
    - c. Identifikasi bantuan perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

- d. Pengawasan (supervisi) bantuan perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Samarinda.
- Pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat berupa dokumen perencanaan peningkatan jalan perum MBR di Perum Pondok Bukit Lestari dan Perum Graha Poltekba, Balikpapan.

## **2.1.2. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

1. Rendahnya kualitas hidup perempuan pada daerah terpencil sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan usahanya.
2. Perlu perhatian khusus terhadap peningkatan sarana dan prasarana panti yang lebih memadai.
3. Jasa konsultasi perencanaan DED di tahun anggaran yg sama dengan kegiatan fisik.
4. Jasa konsultan DED 2018 tidak ada pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Perumahan masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Perumahan Graha Poltek Balikpapan.
5. Banyaknya masyarakat miskin (berdasarkan data yang ada) di Provinsi Kalimantan Timur dan masih belum memiliki rumah yang layak untuk dihuni.
6. Ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi dari rumah itu sendiri.
7. Persoalan sarana dan prasarana lingkungan yang kurang memadai di suatu komunitas masyarakat yang kurang mampu.

## **b. Solusi**

1. Perlu dilakukan Perjanjian bersama antara instansi terkait pada Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk menunjang kewirausahaan perempuan.
2. Peningkatan sarana prasarana panti yang lebih memadai.
3. Jasa konsultasi perencanaan DED ditahun sebelum kegiatan fisik di mulai.
4. Penyusunan DED pada tahun anggaran 2019 untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Perumahan masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Perumahan Graha Poltek Balikpapan.
5. Perlunya perhatian dari Pemerintah Daerah dalam penyediaan program pembangunan rumah layak huni beserta sarana dan prasarananya di setiap tahun.
6. Swadaya masyarakat yang sudah dilaksanakan.

## **2.2. Prioritas 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

### **2.2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

#### **a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 4: Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerjadilaksanakan melalui 9 program dan 17 kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp.5,704 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah tingkat pengangguran sebesar 6,91% melampaui target sebesar 7,18%.

**Tabel 4.8.**  
**Program Kegiatan Prioritas**  
**terkait Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

<b>Prioritas 4 : Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>		
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN TENAGA TERAMPIL BIDANG JASA KONTRUKSI (TUKANG KAYU, BATU, LAS, KERAMIK, PLUMBING, DST)</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA &amp; TRANSMIGRASI</b>

2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.1	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF, USAHA KECIL MENENGAH		
	4.1	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	
	4.2	Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah	
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI		
	5.1	Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	
	5.2	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	
6	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN KOMPETITIF		DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
	7.2	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	
8	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA		
	8.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	
	8.2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	
	8.3	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	
	8.4	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	
	8.5	Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya	
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN REMAJA PUTUS SEKOLAH		DINAS SOSIAL

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

#### b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja” pada Tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 98,08% dan realisasi fisik 98,03%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst).

Pada tahun 2017, pelaksanaannya dialihkan pada :

- a. Program peningkatan produktivitas melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja sebanyak 40 orang;
  - b. Program pelatihan pencari kerja melalui kegiatan pengadaan bahan dan materi pendidikan ketrampilan kerja untuk BLK/LLK yang memenuhi standar sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) kejuruan sebanyak 3 jurusan; dan kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kepada 80 orang yang menerima bahan dan materi pelatihan di UPTD BLK Balikpapan dan Bontang.
2. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berupa peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK (Pengembangan TK) sebanyak 20 instruktur/orang untuk meningkatkan kompetensi instruktur BLK menjadi asesor dalam menunjang pelaksanaan sertifikasi kompetensi.
  3. Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah.  
Pada tahun 2017, program ini direvisi dan pelaksanaannya dialihkan menjadi program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif melalui kegiatan perencanaan, pengembangan dan evaluasi pelatihan berupa pelatihan anyaman rotan dan kerajinan kayu sebanyak 20 orang.
  4. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif, usaha kecil menengah, melalui kegiatan ;

- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi 1.200 UMKM Wirausahawan Baru (WUB) yang dilatih.
  - Pengembangan produksi dan akses usaha kecil menengah sebanyak 89 UKM yang mendapat akses permodalan.
5. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, melalui kegiatan :
- Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi berupa 11 koperasi yang mendapatkan pembinaan/perkoperasian.
  - Pelatihan manajemen pengelola koperasi (DAK) untuk 3.534 koperasi aktif dan 22 pelatihan.
6. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. Dan pada tahun 2017, program ini tidak dilaksanakan.
7. Program pengembangan kewirausahaan kompetitif, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi 100 orang pencari kerja.
8. Program peningkatan kesempatan kerja, melalui kegiatan :
- Penyusunan informasi bursa tenaga kerja yang memuat informasi lowongan yang tersedia dengan kompetensi yang dipersyaratkan.
  - Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja melalui kegiatan Job Market Fair (JMF) yang dilaksanakan di Kota Samarinda, diikuti oleh 53 perusahaan, 1.494 lowongan dengan 8.251 berkas lamaran. Dari kegiatan tersebut yang telah diterima bekerja sebanyak 409 orang.
  - Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan kepada 60 orang pencari kerja yang dilatih kewirausahaan.

- Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat kepada 16 orang pencari kerja yang memiliki keterampilan.
  - Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya kepada 62 orang tenaga kerja yang mendapat pekerjaan sementara.
9. Program pemberdayaan remaja putus sekolah.
- Pada tahun 2017, program ini direvisi menjadi program pembinaan anak terlantar melalui kegiatan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di bidang tata rias dan bidang otomotif.

### **2.2.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

Secara umum pencapaian target program-program dan sasaran pengurangan angka pengangguran dapat tercapai, namun masih ditemukan permasalahan seperti :

1. Supply laporan IPK dari Kabupaten/Kota belum berjalan sesuai dengan waktu yang ditargetkan, sehingga laporan IPK Provinsi sering terlambat.
2. Kompetensi pencari kerja sebagian besar belum memenuhi kriteria yang diperlukan perusahaan.
3. Hasil evaluasi dengan perusahaan masih banyak pencari kerja yang belum mempunyai Soft Skill untuk memasuki dunia kerja.
4. Pembagian kewenangan urusan koperasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirasakan membatasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi karena cakupan pembinaan koperasi dan UMKM hanya mencakup koperasi yang anggotanya lintas Kabupaten/kota dan pembinaan bagi usaha kecil saja.

5. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan.
6. Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UMKM baik dari segi kemasan, perijinan, kontinuitas atau kualitas produk yang mengakibatkan terbatasnya akses pasar.
7. Kurangnya kemampuan SDM koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi informasi mengakibatkan terlambatnya UMKM dalam mengakses informasi terkait dengan pengembangan usaha.
8. Pelaksanaan diklat koperasi dan UMKM dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih terkendala dalam kegiatan pendampingannya. Hal ini disebabkan lokasi koperasi Peserta diklat terpencar dan terpencil sehingga agak menyulitkan untuk dilakukan pendampingan karena selain jaraknya yang jauh, sarana transportasi dan informasi juga masih sulit.
9. Kompetensi tenaga pendamping masih sangat terbatas mengingat salah satu persyaratan untuk tenaga pendamping adalah sarjana atau D3. Sedangkan di Kaltim, kebanyakan sarjana/D3 masih berorientasi menjadi PNS atau karyawan perusahaan. Apalagi untuk pelaksanaan pendampingan di daerah terpencil dan perbatasan masih kurang dukungan ketersediaan SDM pendamping yang berkompeten.
10. Dalam rangka revitalisasi koperasi, dilaksanakan beberapa upaya untuk mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas yang meliputi : Rehabilitasi, Reorganisasi dan pengembangan. Khusus Pelaksanaan rencana pembubaran koperasi tidak aktif berdasarkan Online Data System Kementerian Koperasi mengalami kendala karena beberapa koperasi tidak aktif tersebut masih mempunyai pinjaman program pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dan Masih banyak

koperasi yang belum aktif melakukan RAT padahal kegiatan usaha koperasi berjalan aktif.

11. Pelaksanaan Program Penumbuhan Wirausaha Baru yang meliputi pelaksanaan diklat, bantuan peralatan produksi dan pendampingan usaha masih mengalami beberapa kendala antara lain terbatasnya anggaran dan waktu diklat sehingga materi yang disampaikan belum dapat dikuasai dan dipraktekkan oleh peserta secara maksimal. Selain itu SDM UMKM yang belum menguasai manajemen usaha dengan baik, menyebabkan usaha tidak dapat berkembang secara optimal. Untuk itu diperlukan juga adanya program pendampingan Wira Usaha Baru (WUB) agar diberikan alokasi anggaran yang mencukupi.
12. Belum optimalnya pelaksanaan program kemitraan dan CSR bagi UMKM dan koperasi sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

**b. Solusi**

1. Kabupaten/Kota harus mengirimkan laporan IPK secara berkala dan tepat waktu.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga hasil identifikasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar pelatihan.
3. Menggalakkan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kerja oleh fungsional pengantar kerja ke sekolah-sekolah dan kepada para pencari kerja.
4. Pelatihan-pelatihan berbasis pemuda dan masyarakat yang diminta tidak dapat ditempatkan secara formal.
5. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UKM.

Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten/kota dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.

6. Pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Klinik Bisnis koperasi dan UKM yang didukung oleh para pendamping untuk melakukan konsultan/pendampingan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan fasilitasi pemasaran produk baik secara online maupun offline.
7. Memfasilitasi dan mendorong UKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UKM ikut pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin usaha (IUMK, PIRT, Halal dll).
8. Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan kelas bisnis yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk pemahaman UKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha dll.
9. Rekrutmen dan usulan pendamping DAK yg dilakukan oleh dinas yg membidangi kop dan ukm kab kota diarahkan dg mengoptimalkan SDM pendamping yg berasal dr wilayah yg dekat dg lokasi peserta diklat dg catatan memenuhi kriteria dan persyaratan sbg pendamping DAK non fisik PK2UKM.
10. Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat/bimtek pendamping, dan mengikutsertakan beberapa pendamping dalam program/kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.

11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan dinas kabupaten/kota untuk menghindari adanya kesalahan dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan koperasi dan data per jenis koperasi yang dientry dalam ODS agar dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten/Kota dan dilakukan Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Melakukan koordinasi dan sinergi program penumbuhan wirausaha baru dg stakeholder terkait yg mempunyai program dan anggaran yg diperuntukkan unt pemberdayaan masyarakat khususnya wirausaha baru. Misalnya program kemitraan dan bina lingkungan dari BUMN serta program CSR dari beberapa perusahaan swasta.
13. Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder dalam mengoptimalkan program kemitraan antara pengusaha besar dengan UMKM dan koperasi. Antara lain dengan PT. Total dalam pendampingan UMKM, PT. Lottemart dalam akses pasar produk UMKM, Bank Kaltim dalam pembinaan dan akses pembiayaan, PT. Telkomsel dalam pembentukan kampung digital dan lain-lain.

## **2.3 Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

### **2.3.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

#### **a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 5: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dilaksanakan melalui 2 program dan 3 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,433 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah paritas daya beli Rp 11.355 dari target Rp 11.600, namun masih berada pada status on track.

**Tabel 4.9**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

<b>Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan</b>		
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>BAPPEDA</b>
1.1	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	
1.2	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN KOORDINASI TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID)</b>	<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>

*Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017*

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” pada Tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 98,38% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian pengembangan ekonomi kerakyatan, adalah sebagai berikut :

1. Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah, melalui kegiatan :
  - Monitoring dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ), laporan Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
  - Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD berupa laporan hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Kabupaten/Kota, laporan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Program penguatan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Pada tahun 2017, program ini telah direvisi menjadi kegiatan yang berada pada program peningkatan sinergi kebijakan ekonomi daerah yang pelaksanaannya berupa dokumen laporan hasil koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah Provinsi Kaltim, terbentuknya TPID Kabupaten/Kota se-Kaltim, terciptanya stabilitas inflasi daerah sebesar 3,15%, stabilitas ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di daerah.

### **2.3.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun belum tepat mengarah dalam upaya pencapaian pengembangan ekonomi kerakyatan, dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan hanya bersifat memonitor pelaksanaan pembangunan secara general (tidak fokus pada kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan).
2. Tingkat Inflasi dengan realisasi inflasi di Kalimantan Timur sebesar 3,15% masih menyisakan sejumlah permasalahan sebagai berikut :
  - a) Inflasi di Kalimantan Timur didominasi oleh kelompok volatile foods dan administered prices.
  - b) Ketersediaan pasokan pangan.
  - c) Gangguan distribusi yang disebabkan oleh mekanisme bongkar muat, kondisi infrastruktur dan cuaca.

## **b. Solusi**

1. Perlu adanya penyusunan program kegiatan yang lebih mengarah pada upaya pencapaian pengembangan ekonomi kerakyatan, serta pelaksanaan monitoring yang lebih terpadu dan teratur.
2. Permasalahan terkait inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dapat ditindaklanjuti dengan :
  - a) Menyelenggarakan high level marketing TPID.
  - b) Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga barang (komoditi pangan) terutama pada hari-hari besar keagamaan.
  - c) Perumusan kebijakan arus bongkar muat barang kebutuhan pokok di pelabuhan yang lebih efektif dan efisien, serta perbaikan infrastruktur.

## **2.4. Prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi**

### **2.4.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

#### **a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 6: Percepatan Transformasi Ekonomi dilaksanakan melalui 4 program dan 10 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,592 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah pertumbuhan ekonomi dengan migas 3,13% yang telah mencapai target  $0,5 \pm 1$ ; pertumbuhan ekonomi dengan non migas 4,04% yang telah mencapai target  $1 \pm 1$ ; dan pertumbuhan ekonomi dengan non migas dan non batubara 5,24% yang telah mencapai target  $4 \pm 1$ .

**Tabel 4.10**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Percepatan Transformasi Ekonomi**

Prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi		
No	Program / Kegiatan	PERANGKAT DAERAH

1	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI		DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI		
3	PROGRAM KEMUDAHAN PELAYANAN DAN PERCEPATAN PROSES PERIJINAN		
	3.1	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	
	3.2	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	
	3.3	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Percepatan Transformasi Ekonomi” pada Tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 95,34% dan realisasi fisik 99,19%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian percepatan tranformasi ekonomi, adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Pada tahun 2017, program ini direvisi menjadi :
  - a. Program pengendalian pelaksanaan investasi melalui kegiatan :
    - Pembinaan dan pengawasan penanaman modal kepada 128 perusahaan, SMM ISO 9001:2008.
    - Pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan informasi penanaman modal berupa 105 LKPM, SMM ISO 9001:2008.
  - b. Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal melalui kegiatan penyusunan perencanaan dan kebijakan penanaman modal; dan penyusunan kajian pengembangan potensi daerah.

- c. Program penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan dunia usaha melalui kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal berupa 3 event promosi yaitu : Kaltim Fair, Kaltim Expo dan pameran di Jakarta tentang infrastruktur.
2. Program kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan, melalui kegiatan :
    - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer melalui penerbitan 1123 izin/non izin investasi sektor primer.
    - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier berupa 1685 izin/non izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan; SMM ISO 9001:2008.
    - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui penerbitan 71 izin / non izin penanaman modal; SMM ISO 9001:2008.

#### **2.4.2. Permasalahan dan Solusi**

##### **a. Permasalahan**

1. Belum optimal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disebabkan masih terbatasnya sarana PNS dan kinerja Tim Teknis.
2. Belum optimalnya promosi investasi yang dilakukan disebabkan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota belum maksimal dan terintegrasi.
3. Masih terbatasnya penyampaian profil komoditi unggulan yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi.
4. Ketersediaan lahan dan jaminan hukum merupakan salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur.
5. Belum optimalnya ketersediaan dan persebaran sarana dan prasarana dasar pendukung investasi seperti jalan,

pelabuhan udara/laut, pasokan listrik, air, perhotelan, dan lain-lain.

**b. Solusi**

1. Perlu adanya penambahan tenaga PNS yang menguasai bidangnya khususnya di Bidang Pelayanan Perizinan.
2. Meningkatkan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka promosi investasi penanaman modal dengan DPMPTSP Provinsi leading sector .
3. Penyusunan Feasibility Study serta kajian-kajian tentang peluang investasi di Kaltim yang komprehensif dan rinci.
4. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang tata ruang dan peruntukan lahan.
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral sehingga adanya satu komitmen untuk membangun fasilitas pendukung investasi di Kaltim.

**2.5 Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan**

**2.5.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

**a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 8: Peningkatan Produksi Pangan dilaksanakan melalui 12 program dan 25 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27,400 Milyar. Capaian prioritas ini adalah kontribusi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 7,96% dari target 9,00%, berada pada status on track.

**Tabel 4.11**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait**  
**Peningkatan Produksi Pangan**

<b>Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan</b>		
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>

1	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN		DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA
2	PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH LAPANGAN		
	3.1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	
	3.2	Pengembangan SDM Penyuluh	
	3.3	Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian dan Sarana Pendukungnya (DAK)	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYULUH		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA		
	5.1	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	
	5.2	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Dibangun (DAK)	
	5.3	Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Informasi Sumber Daya Air	
	5.4	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air	
6	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN		DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA
	6.1	Penanganan daerah rawan pangan	
	6.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	
	6.3	Pengembangan cadangan pangan daerah	
	6.4	Pengembangan lumbung pangan desa	
	6.5	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	
	6.6	Pengembangan sistem informasi pasar	

Sumber :RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Produksi Pangan” pada Tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 82,10% dan realisasi fisik 83,87%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian peningkatan produksi pangan, adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

Pada tahun 2017, program ini direvisi menjadi :

a. Program peningkatan produksi pertanian hortikultura melalui kegiatan :

- Pengembangan dan pemeliharaan kawasan hortikultura seluas 100 Ha.
- Pengembangan hortikultura diperkotaan berupa pengadaan bibit sebanyak 10.000 polybag.
- Pengelolaan data statistik hortikultura.

b. Program peningkatan produksi benih tanaman pangan melalui kegiatan penumbuhan, pembinaan dan pengembangan benih padi dan palawija kepada 60 orang.

c. Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui kegiatan sertifikasi bibit unggul pertanian sebanyak 5.000 label.

d. Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan melalui kegiatan :

- Pengembangan sentra produksi tanaman pangan seluas 300 Ha.
- Pengelolaan data statistik tanaman pangan.

2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

Pada tahun 2017, program ini direvisi menjadi :

a. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian hortikultura melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian hortikultura tepat guna sebanyak 2 jenis.

b. Program peningkatan penerapan teknologi benih hortikultura melalui kegiatan pelatihan penerapan

teknologi pertanian modern bercocok tanam kepada 20 orang.

- c. Program peningkatan penerapan teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura melalui kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
  - d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui kegiatan monitoring dan pengawasan peredaran benih berupa 20 rekomendasi.
  - e. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna sebanyak 2 jenis.
3. Program pengembangan dan penguatan kelembagaan penyuluh.

Pada tahun 2017, program ini direvisi menjadi program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan melalui kegiatan :

- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian demplot di 2 kelompok tani.
  - Pembangunan/perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian dan sarana pendukungnya (DAK) sebanyak 8 unit.
4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, melalui kegiatan:
- Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun berupa jaringan irigasi sekunder D.I. Labanan yang dibangun sepanjang 1.754 meter; jalan inspeksi pertanian sepanjang 13.364 meter; bangunan bagi sadap sebanyak 4 buah dan gorong-gorong sebanyak 5 buah.
  - Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK) berupa 1.443 meter jaringan irigasi saluran

primer; 255 meter jaringan irigasi saluran sekunder; 3 buah box bagi sadap; 3 buah gorong-gorong; 3 buah saluran talang; dan 933 meter saluran pembuang.

- Kegiatan pengelolaan hidrologi dan informasi sumber daya air berupa peralatan jaringan komputer, peralatan pos hidrologi.
  - Kegiatan koordinasi pengelolaan sumber daya air berupa workshop peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya air.
5. Program peningkatan ketahanan pangan, melalui kegiatan:
- Penanganan daerah rawan pangan berupa analisis SKPG peta kerawanan pangan.
  - Pengembangan cadangan pangan daerah sebanyak 200 ton cadangan beras Provinsi.
  - Pengembangan lumbung pangan desa berupa pengisian lumbung pangan desa sebanyak 2 unit.
  - Pemantauan dan analisis harga pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
  - Pengembangan sistem informasi pasar Kabupaten/Kota.

## **2.7.2. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

1. Belum semua Kabupaten/Kota mengalokasikan cadangan pangan secara cukup.
2. Masih minimnya jumlah sawah yang beririgasi.
3. Belum tersedianya data spasial terkait lokasi lahan sawah dan rencana cetak sawah.
4. Koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani pertanian, terutama terkait pembangunan jaringan tersier dan cetak sawah masih belum optimal.

### **b. Solusi**

1. Perlunya penambahan alokasi untuk cadangan pangan.

2. Perlunya pembangunan dan perbaikan irigasi pada lokasi-lokasi sentra tanaman pangan.
3. Membuka dan memperkuat koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Sumber Daya Air) dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura, terutama dalam pertukaran data lokasi lahan pertanian.

### **Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata**

Misi ketiga Kaltim Maju 2018 adalah Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata , dengan tujuan Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas. Adapun sasaran pembangunan infrastruktur adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar dengan indikator indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar yang pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 6,80 dengan kategori cukup.


Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi tidak melakukan survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) karena keterbatasan anggaran pembangunan dengan memprioritaskan pada kegiatan pembangunan yang berorientasi pelayanan publik, sehingga perhitungan capaian pembangunan infrastruktur didasarkan pada capaian indikator program yaitu :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan indikator capaian yaitu 96,06%.
2. Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan dengan indikator capaian yaitu 84,70%.
3. Program pembangunan jalan tol dengan indikator capaian yaitu 99,99%.
4. Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan dengan indikator capaian yaitu 94,68%.
5. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku dengan indikator capaian yaitu 99,92%.

6. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan indikator capaian yaitu 90,52%.
7. Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air dengan indikator capaian yaitu 94,73%.
8. Program pengendalian banjir dengan indikator capaian yaitu 82,80%.
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator capaian yaitu 59,56%.

Dari capaian program tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang ditargetkan pada tahun 2017 dapat mencapai indeks 6,80 dengan kategori cukup.

**Tabel 4.12**  
**Capaian Sasaran Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	PERKIRAAN CAPAIAN 2017	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	6,80	6,80	On Track/ Tercapai	

*Sumber : Evaluasi Tahun Keempat RPJMD Kalimantan Timur TA 2013-2018 dan hasil analisis tim tahun 2017.*

Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan Infrastruktur Dasar diupayakan melalui pencapaian Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar.

### **3.1. Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar**

#### **3.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

##### **a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas10: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui 12 program dan 36 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,047 Trilyun.

**Tabel 4.13**  
**Program Kegiatan Prioritas**  
**terkait Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar**

Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.1	Perencanaan pembangunan jalan	
	1.2	Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahulu	
	1.3	Pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	
	1.4	Peningkatan Jalan Sp. Ambalut - Sebulu 1 (DAK)	
	1.5	Peningkatan Jalan Sp. Ambalut - Sebulu 2 (DAK)	
	1.6	Peningkatan Jalan Km.38 - Semoi - Sepaku (DAK)	
	1.7	Peningkatan Jalan Sepaku - Petung (DAK)	
	1.8	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAK)	
2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
3	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	3.1	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang	
	3.2	Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam IV	
	3.3	Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy	
	3.4	Pembebasan Lahan	
	3.5	Pembangunan Jembatan Mahakam IV	
4	Program pembangunan jalan tol		
	4.1	Pembangunan jalan tol balikpapan - samarinda	
5	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan		
	5.1	Pembangunan Jalan Sakaq Lotoq - Sp. Abit - Kahala Kota Bangun	
	5.2	Pembangunan Jalan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari	
	5.3	Pembangunan Jembatan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari	

6	<b>Program Penyediaan dan pengelolaan air baku</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	6.1	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	
7	<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.</b>		
	7.1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
	7.2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	
	7.3	Pengembangan sistem distribusi air minum	
8	<b>Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air</b>		
	8.1	Pembangunan reservoir	
9	<b>Program pengendalian banjir</b>		
	9.1	Pembangunan reservoir pengendali banjir	
	9.2	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	
	9.3	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	
	9.4	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	
	9.5	Pembangunan prasarana pengaman pantai	
10	<b>Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP</b>		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
	10.1	Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	
	10.2	Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur	
11	<b>Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara</b>		<b>DISKOMINFO</b>
12	<b>Program sarana dan prasarana telekomunikasi</b>		

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar” pada Tahun 2017 rata-rata mencapai

realisasi keuangan 97,34% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 98,46%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar, adalah sebagai berikut :

1. Program pembangunan jalan dan jembatan, melalui kegiatan :

- Perencanaan pembangunan jalan (AMDAL).
- Pembangunan jalan pendekat jembatan mahulu (pembayaran eskalasi).
- Pengawasan pembangunan jalan dan jembatan.
- Peningkatan jalan Sp. Ambalut - Sebulu 1 dan jalan Sp. Ambalut - Sebulu 2 (DAK) rigid pavement masing-masing sepanjang 1.000 meter.
- Peningkatan jalan Km.38 - Semoi - Sepaku dan jalan Sepaku - Petung (DAK) rigid pavement masing-masing sepanjang 1.000 meter, serta pengawasan pembangunan jalan dan jembatan (DAK).

2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pada tahun 2017, program ini direvisi dan pelaksanaannya berada pada UPTD pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum melalui :

- a. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan dan jaringan irigasi wilayah I berupa pemeliharaan jaringan irigasi (permbersihan saluran primer dan skunder) di daerah irigasi Sepaku, Petung, Sebakung, Waru dan Babulu Darat.
- b. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan dan jaringan irigasi wilayah II melalui kegiatan :
  - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II berupa pengecatan & pembersihan jembatan Mahulu, Dondong, Sanga-sanga, Sebulu, Rapak Indah, Teuku umar, KH. Hasyim ashari

sepanjang 1.480 Km; Pekerjaan Perkerasan Aspal di Sebulu, Meranti, KH. Wahid Hasyim, M. Yamin, Ahmad Yani I dan II, Jembatan Arah Loajan & Loabuah sepanjang 220 meter; Potongan rumput bahu jalan di Ring road II-III & HM. Ardan, Samarinda-Sebulu, Samarinda-Anggana-Sai Meriam, Sp. Sambera-Muara Badak, TPK Palaran-Dondang sepanjang 149 Km; Pekerjaan rigid pavement di Ring road II, MT. Haryono, Damanhuri, Ring Road, Sei. Musi, Sei. Tellen sepanjang 400 meter; Pembersihan saluran di Rapak Indah, HM. Rifaddin sepanjang 8 Km; Pembersihan Tanah di Badan Jalan Ring Road II-III, Tinggiran (Ex.Pangeran Suryanata), Mt. Haryono & HM. Ardans sepanjang 29 Km; Pekerjaan pasangan batu kosong; Pekerjaan rigid pavement jalan poros Muara Badak sepanjang 210 meter; Pekerjaan Rigid Pavement Jalan Kadrie Oening sepanjang 320 meter; Pekerjaan Rigid Pavement Jalan Untung Suropati sepanjang 275 meter; Pekerjaan Rigid Pavement Jalan Padat Karya sepanjang 230 meter; Pekerjaan Rigid Pavement Jalan Ring Road II sepanjang 75 meter; Pekerjaan Rigid Pavement Jalan Ring Road III sepanjang 20 meter; Pekerjaan Rigid Pavement Jalan Wijaya Kesuma sepanjang 40 meter; Pekerjaan Rigid Pavement Jalan KH. Hasyim Ashari sepanjang 35 meter; Pekerjaan Rigid Pavement Jalan MT. Haryono sepanjang 35 meter.

- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi wilayah II berupa rehabilitasi pemeliharaan saluran pembawa jaringan irigasi sepanjang 47 Km; Rehabilitasi pemeliharaan saluran pembuang jaringan irigasi sepanjang 61 Km; Rehabilitasi pemeliharaan

bagunan bagi/sadap jaringan irigasi sebanyak 28 buah; Operasional Pompa irigasi sebanyak 7 buah; Pemeliharaan bending dan scatdam; Pemeliharaan jalan usaha tani sepanjang 100 meter; Normalisasi saluran pembuang sepanjang 2.945 meter;

- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana SDA berupa Penanganan Gg. Polder Indra (Jalan Bangeris Samarinda, Jalan Cendana) sepanjang 1.353 meter; Penanganan Sei. Manggis (Jalan MT. Haryono) sepanjang 500 meter; Penanganan Sungai Manggis (Jalan Cendana, Samarinda) sepanjang 305 meter; Pemeliharaan bendal HM. Ardans (Jalan Ring Road); Normalisasi Sei. Karang Asam Kecil (Sei. Antasari, Air Tinggiran Jl. P. Suryanata) sepanjang 1.090 meter; Normalisasi/pemeliharaan folder I dan II serta saluran pembuang (outlet) RSUD AW. Syahrani Kota Samarinda.

c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah III melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III berupa penanganan di 10 titik longsor.

3. Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan, melalui kegiatan :

- Pembangunan jalan akses Jembatan Pulau Balang berupa sisi PPU dengan rigid pavement sepanjang 500 meter.
- Pembangunan jalan pendekat Jembatan Mahakam IV berupa sisi Samarinda Kota sepanjang 502,40 meter yang telah terealisasi sebesar 25%; Sisi Samarinda Seberang sepanjang 386,65 meter yang telah terealisasi sebesar 25%.
- Pembangunan jalan dalam kawasan Maloy berupa pekerjaan tanah sepanjang 75 meter.

- Pembebasan lahan berupa dokumen pengarsipan data yang telah dibebaskan dan persiapan serah terima lahan yang telah dibebaskan.
  - Pembangunan Jembatan Mahakam IV berupa jembatan dengan panjang 430 meter yang telah terealisasi sebesar 80%.
4. Program pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 22 Km yang telah terealisasi sebesar 50%.
  5. Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan, melalui kegiatan :
    - Pembangunan Jalan Sakaq Lotoq - Sp. Abit - Kahala Kota Bangun dengan rigid pavement sepanjang 250 meter.
    - Pembangunan Jalan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari dengan pekerjaan tanah sepanjang 5 Km.
    - Pembangunan Jembatan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari berupa jembatan Baeley sebanyak 7 unit.
  6. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku, melalui kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa berupa pengadaan pipa transmisi air baku sepanjang 28.710 meter; pipa transmisi yang tersambung sepanjang 16.890 meter dan pipa transmisi yang tertanam 15.947 meter.
  7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, melalui kegiatan :
    - Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa pengawasan dan pengadaan/pemasangan pipa air minum/air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah sepanjang 3.365 meter di Kota Samarinda
    - Penyediaan prasarana dan sarana air limbah berupa pengawasan (Supervisi) dan pembangunan IPLT Bontang; Pengawasan dan pembangunan sanitasi

dibantaran Sungai Karang Asam Kecil, Samarinda; Identifikasi dan Perencanaan Sanitasi Dibantaran Sungai Karang Asam Kecil Kota Samarinda.

- Pengembangan sistem distribusi air minum berupa Pengawasan (Supervisi) dan pekerjaan pemasangan pipa distribusi dia. 200 mm, Lokasi Sangata (dia. 200 mm panjang 650 m, 112 unit pipa, dia. 100 mm panjang 2.100 m, 362 unit pipa, dia. 63 mm = 2.388 m, 412 unit pipa dengan total keseluruhan 5.138 meter dan 886 unit pipa); Pengawasan (supervisi) dan pekerjaan pengadaan/pemasangan pipa distribusi diameter 600 mm dari Gang Sepakat Sampai Jalan Mulawarman Balikpapan (reservoir kap 600, pompa kap 50 p/det 2 buah dan pompa kap 25 p/det 4 buah, pipa HDPE dia 250 mm = 2.950, dia 200 mm = 2.462 m, dia 160 mm = 2.480 m, dia 90 mm = 14.164 m, dia. 600 mm = 2.039 m) tahap II (pipa HDPE dia 200 mm = 988 m, dia 160 mm = 205 m, dia 90 mm = 9.154 m, dia 600 mm = 276 m); Pengawasan (supervisi) dan pekerjaan optimalisasi jaringan pipa distribusi dan pompa SPAM Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara berupa booster dan jaringannya; Pengawasan (supervisi) pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maloy, Kabupaten Kutai Timur (MYC).
8. Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air, melalui kegiatan pembangunan reservoir berupa pengadaan dan pemasangan riprap beton sepanjang 400 meter.
9. Program pengendalian banjir, melalui kegiatan :
- Pembangunan reservoir pengendali banjir berupa Normalisasi dan perkuatan tebing dengan pasangan batu di sungai Air Putih sepanjang 127 meter; Normalisasi Sungai Karang Asam Kecil sepanjang 608 meter; Pengerjaan pintu di Bendali HM. Ardans serta

pemasangan Trash track sebanyak 5 buah, pembangunan jembatan bentang di Jl. Nusa Indah sepanjang 11 meter, pembangunan jembatan pelayanan di Jl. Antasari sebanyak 44 buah; Pengangkatan kayu log dan jamban sejumlah 67 batang sepanjang 600 meter sampai dengan muara sungai karang asam kecil.

- Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai berupa saluran Jalan Harun Nafsi sepanjang 249 meter; Outlet Bangunan Pelimpah; Plat pelayanan untuk rumah warga dan gang sebanyak 168 buah; Jalan lingkaran kolam retensi sepanjang 196 meter; pintu air di polder loajanan sebanyak 1 pasang.
- Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali berupa normalisasi saluran Loa Bakung sepanjang 1.629 meter.
- Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir berupa box culvert mugirejo sepanjang 20,10 meter dan SMA 13 sepanjang 3 meter; Peningkatan saluran drainase mugirejo sepanjang 44 meter dan Tridarma sepanjang 183 meter; Normalisasi Sungai Talang Sari sepanjang 2.500 meter.
- Pembangunan prasarana pengamanan pantai dilaksanakan di Pantai Talisayan sepanjang 1.192 meter dan pembuatan gorong-gorong 1 buah.

10. Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP, melalui kegiatan:

- Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru berupa konstruksi runway panjang 2.250m x 45m; Stopway 2 x 60m x 45m; Runway End Safety Area (RESA) 2 x 90m x 90m; Runway strip 2.250m x 300m; Exit Taxiway (1 buah/Delta); Apron (300m x 123m); Jalan akses PK-PPK (Pemadam Kebakaran) 233m x 7m; Jalan akses masuk

bandara 2 x 100m dan 60m; Pengadaan & pemasangan pagar bandara sepanjang  $\pm$  4 km; Pengadaan meubelair gedung terminal penumpang dan Gedung VIP.

- Pembangunan Bandar Udara Maratua berupa lanjutan pembangunan shoulder R/W 31 (Granular); Pelapisan turning area R/W 31 (Aspal); Perpanjangan RESA (Granular); Pembuatan overrun R/W 13 & R/W 31 (Aspal)
- Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur berupa Pembangunan Jalan Pendekat (cause way) Rigid Pavement Paket 1 sepanjang 160 m dan Paket 2 sepanjang 850 m beserta drainase; Total panjang Jalan Pendekat (cause way) Rigid Pavement adalah 1.010 m.

11. Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara tidak dilaksanakan pada tahun 2017.

12. Program sarana dan prasarana telekomunikasi tidak dilaksanakan pada tahun 2017.

### **3.1.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Masih terkendalanya dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pembangunan bendungan untuk fungsi air baku.

#### **b. Solusi**

1. Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk penyediaan lahan.

### **Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik**

Misi keempat Kalimantan Timur Maju 2018 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik, yang dijabarkan dalam 1 tujuan dan 3 sasaran. Satu tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan tiga sasaran yaitu (1) Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas

KKN, (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, (3) Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja.

Capaian sasaran pembangunan di misi keempat sebagian besar menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahwa opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2016 menjadi sama dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2017. Sementara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 5,56 dari target 5,80.

Selanjutnya juga terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target 83 menjadi 80,56 dengan kategori baik.

Akuntabilitas kinerja Provinsi mendapatkan nilai B+ (sangat baik) (berdasarkan evaluasi Kementerian PAN dan RB RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)). Pemerintah Provinsi bertekad akan tetap meningkatkan kinerja melalui peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja.

**Tabel 4.14**  
**Capaian Sasaran Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	CAPAIAN 2017	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Persepsi Korupsi	5,80	5,56	On Track/ Tercapai	
2.	Opini BPK	WTP	WTP	On Track/ Tercapai	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	80,56	In Progress	
4.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	78,00 (BB)	77,49 (B+)	In Progress	
5.	Kinerja Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi	Tinggi	In Progress	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur \*) data tahun 2015, \*\*) data SKPD

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik diupayakan melalui

pencapaian Prioritas 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

#### 4.1. Prioritas 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

##### 4.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

###### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 11: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dilaksanakan melalui 8 program dan 47 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26,370 Miliar.

Capaian prioritas ini adalah indeks persepsi korupsi 5,56% dari target 5,80%; opini BPK dengan WTP yang mencapai target WTP; Indeks kepuasan masyarakat 80,56% dari target 83%; Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah 77,49% dari target 78,00%; dan kinerja pemerintahan daerah yang mencapai kriteria tinggi.

**Tabel 4.15**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

Prioritas 11 :Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			
No		Program / Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Program penguatan kelembagaan PTSP		BIRO ORGANISASI
2	Program peningkatan pelayanan publik		
	2.1	Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	
	2.2	reformasi pelayanan sektor publik	
3	Program pengembangan zona integritas		INSPEKTORAT
	3.1	Penerapan zona integritas pada SKPD	
4	Program pencegahan dan pemberantasan KKN		
	4.1	Penanganan pengaduan masyarakat	
	4.2	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus	
	4.3	Fasilitasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN	

5	<b>Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah</b>		
6	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH</b>
7	<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</b>		<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
	7.1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	
	7.2	Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	
	7.3	Penempatan PNS	
	7.4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	
	7.5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	
	7.6	Pemberian penghargaan bagi PNS	
	7.7	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	
	7.8	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	
	7.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
	7.10	Ujian Dinas	
	7.11	Rapat Kerja Kepegawaian	
	7.12	Evaluasi Kinerja PNS	
	7.13	Pemberhentian PNS	
	7.14	Penilaian Prestasi Kerja PNS	
	7.15	Pemetaan dan Pengukuran Kompetensi Pegawai	
	7.16	Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian	
8	<b>Program Integrasi Aplikasi</b>		<b>DISKOMINFO</b>
9	<b>Pengembangan data statistik dan spasial</b>		<b>BAPPEDA</b>
	9.1	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	
	9.2	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	
10	<b>Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja</b>		

	10.1	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	<b>BIRO ORGANISASI</b>
	10.2	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
<b>11</b>	<b>Program Pendidikan politik masyarakat</b>		<b>BANKESBANGPOL</b>
	11.1	Penyusunan data base partai politik, Orpol, Ormas, LSM dan Lembaga Adat	
	11.2	Pemantauan perkembangan politik di daerah	
	11.3	Penyusunan IDI	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

## b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan” pada tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 90,74% dan rata-rata realisasi fisik 92,06%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, adalah sebagai berikut :

### 1. Program penguatan kelembagaan PTSP.

Pada tahun 2017, program ini tidak dilaksanakan. Sesuai dengan Perpres No 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan PTSP, penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk pelayanan perizinan atau nonperizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah. Sementara di wilayah provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP) dan untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP). Hasil rakornas PTSP di Surabaya pada tanggal 18-21 Nov 2015 yang diselenggarakan oleh Dirjen Bina Administrasi

kewilayahan Kemendagri, menginginkan kelembagaan PTSP dalam bentuk Badan akan tetapi sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah urusan penanaman modal masuk dalam Dinas, sehingga adanya kontradiksi antara usulan dengan UU yg ada. Sampai saat ini PP pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah masih di bahas di tingkat kementerian guna mensinkronkan urusan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU sektoral dan pada saat pembahasan PP pengganti pada tgl 23 Nov 2015 di kota Bogor bentuk kelembagaan PTSP masih tetap melekat di urusan penanaman modal, akan tetapi keputusan terhadap bentuk kelembagaan PTSP masih menunggu sampai ditetapkannya PP pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007. Sehingga sampai saat ini biro organisasi belum dapat menetapkan/mengubah/membentuk kelembagaan PTSP secara mandiri sampai dengan ditetapkannya PP dimaksud.

2. Program pengembangan zona integritas, melalui kegiatan penerapan zona integritas pada SKPD.

Pada tahun 2017 ini telah dicanangkan ada 2 OPD yang akan menjadi pilot project penerapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan UPTD Dinas Kesehatan Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat (BKMOM) Prov. Kaltim.

Setelah dilakukan evaluasi oleh Tim ZI Internal terhadap 2 perangkat daerah, hanya RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai OPD Zona Integritas Menuju WBK sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 700/1056/ltprov/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan selanjutnya sesuai hasil evaluasi oleh Kementerian PAN-RB, RSUD Kanujoso Djatiwibowo

Balikpapan telah memenuhi syarat sebagai Perangkat Daerah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan telah ditetapkan pada bulan Desember 2017. Selanjutnya akan diusulkan menjadi Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM).

3. Program pencegahan dan pemberantasan KKN, melalui kegiatan :

- Penanganan pengaduan masyarakat yang diterima langsung dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017 yaitu 15 pengaduan yang masuk, 15 pengaduan yang ditangani, 14 pengaduan yang terbukti kebenarannya, 1 Pengaduan yang tidak terbukti kebenarannya, laporan pengaduan yang terbukti yang telah ditangani berupa 11 pelanggaran disiplin PNS, dan 3 pengaduan pertanggungjawaban dana hibah.
  - Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus sebanyak 13 jenis pemeriksaan.
  - Fasilitasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN meliputi Saberpungli Prov. Kaltim, penanganan pengaduan masyarakat dan rencana aksi PPK Daerah Tahun 2016-2017 serta kegiatan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian PAN-B dan Instansi terkait lainnya dalam upaya melakukan pencegahan KKN.
- Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh Pemerintah Prov. Kaltim, salah satunya adalah koordinasi tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian Daerah maupun ke Kejaksaan Tinggi.
- Upaya lainnya adalah menindaklanjuti Keppres Nomor 87 Tahun 2016 ttg Satgas Saberpungli dan SE Mendagri No. 700/4277/SJ Tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Upaya – upaya lainnya adalah menyelenggarakan Workshop Tunas Integritas bagi Bupati/Walikota, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD se Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur; Workshop Tunas Integritas bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Prov. Kaltim; Worskhop Komite Integritas bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; KORSUPGAH; Workshop Unit Pengendalian Gratifikasi Bagi APIP se-Kalimantan Timur.

4. Program peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pada tahun 2017, pelaksanaan program ini menyesuaikan dengan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sehingga pelaksanaannya seharusnya dijalankan oleh Biro Pemerintahan.

5. Program peningkatan pelayanan publik, melalui kegiatan penerapan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Reformasi pelayanan sektor publik berupa koordinasi penerapan SPM.

6. Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja, melalui kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berupa penyusunan laporan dan fasilitasi evaluasi SAKIP.

7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2017, program ini direvisi menjadi program program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan penyusunan analisa standar belanja; Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD; Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD; Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Sosialisasi paket

regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah; Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Rekonsiliasi keuangan daerah; Pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial dan penyertaan modal; Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; Pengelolaan, pengadministrasian usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah; Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah; Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan; Pengelolaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota; Peningkatan manajemen aset/barang daerah; Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah; Penyusunan standarisasi dan kebutuhan BMD; Monitoring, evaluasi dan pelaporan BMD.

8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, melalui kegiatan :

- Penyusunan rencana pembinaan karir PNS berupa penempatan PNS dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas sebanyak 971 PNS; Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 395 orang.
- Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai berupa penyusunan formasi dan pengambilan sumpah/janji PNS sebanyak 89 orang.
- Penempatan PNS berupa SK yang terbit terhadap usulan mutasi sebanyak 950 SK.
- Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS sebanyak 1.889 SK.
- Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah berupa pengembangan 3 aplikasi, yaitu Simpeg, SKP dan Absensi Online.
- Pemberian penghargaan bagi PNS yang telah mengabdikan selama 10, 20, 30 tahun sebanyak 225 orang.

- Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 26 orang (15 kasus hukdis, 7 kasus pidana, 4 kasus pelimpahan Kabupaten/Kota).
- Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas sebanyak 32 orang dan ujian dinas sebanyak 173 orang.
- Rapat kerja kepegawaian berupa 29 rekomendasi permasalahan kepegawaian.
- Evaluasi kinerja PNS (tingkat kehadiran) sebesar 99%.
- Pemberhentian PNS yang mengambil masa cuti sebanyak 258 orang; Pegawai yang pensiun sebanyak 380 orang.
- Penilaian prestasi kerja PNS, Pengolahan dokumen tata naskah kepegawaian dan Pemetaan dan pengukuran kompetensi pegawai.

#### 9. Program integrasi aplikasi.

Pada tahun 2017 telah mengintegrasikan sebanyak 10 aplikasi yaitu Simda (Sistem Informasi Daerah) dengan Bridgesys; SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan Bridgesys; Bridgesys dengan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); SIRUP dengan Sipesut (Sistem Informasi Pengadaan secara Utuh dan Terpadu); Bridgesys dengan Tepra (Tim Evaluasi Penyerapa Realisasi Anggaran); SIRUP dengan Tepra; Sipesut dengan Tepra; SIDATA dengan Geoportal; Evaluasi Renja dengan SIPPD; Evaluasi Renja dengan Bridgesys.

#### 10. Program pendidikan politik masyarakat, melalui kegiatan penyusunan data base partai politik, Orpol, Ormas, LSM dan Lembaga Adat berupa sosialisasi bimbingan teknis verifikasi bantuan keuangan partai politik kepada pengurusan partai politik; rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), KPU, Bawaslu se-Kalimantan Timur; sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Tokoh Agama (Toga), Tokoh Adat (Todat), Organisasi Masyarakat (Ormas), Tokoh Pemuda

(Toda); pemantauan perkembangan politik di daerah berupa sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan sebanyak 65 orang; dan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia ( IDI ).

11. Program pengembangan data statistik dan spasial, melalui kegiatan penyelenggaraan pengembangan data dan informasi statistik sektoral; dan publikasi data dan informasi geospasial tematik sebanyak 150 IGT.

#### **4.1.2. Permasalahan dan Solusi**

##### **a. Permasalahan**

1. Diperlukan komitmen dari Pimpinan terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
2. Diperlukan kesiapan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam rangka pemenuhan data dukung.
3. Belum optimalnya pengendalian intern yang dilakukan oleh perangkat daerah dan masih ditemukan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
5. Penyusunan dan pengusulan formasi pegawai tahun 2017
  - a. Terdapat kelemahan untuk implementasi Peraturan Menpan Nomor 25 Tahun 2016;
  - b. Terdapat permasalahan terhadap e-formasi;
  - c. Analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) belum sesuai untuk e-formasi, mengingat Anjab dan ABK masih produk lama dan perlu dilakukan penyesuaian.
6. TPP Tetap belum diperhitungkan dengan seksama berdasarkan capaian kinerja.
7. Penempatan Pegawai ASN yang belum sesuai dengan kompetensi.

8. Masih terbatasnya kompetensi guru serta jumlah guru yang dapat mengikuti sertifikasi dikarenakan belum memenuhi persyaratan.

**b. Solusi**



1. Mendorong perangkat daerah untuk terus melakukan peningkatan pengendalian internal melalui pembinaan dan evaluasi.
2. Pihak Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur juga telah membentuk Klinik Integritas yang bertujuan untuk membantu perangkat daerah dalam meningkatkan pengendalian intern dan meningkatkan integritas.
3. Mengoptimalkan pengendalian intern sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
5. Perlu ditetapkan Anjab dan ABK baru agar tidak menyulitkan implementasi dari Permenpan Nomor 25 Tahun 2016.
6. Penetapan kebijakan pengadaan pegawai melalui formasi umum.
7. Memastikan TPP Tetap disediakan dengan perhitungan yang akuntabel berupa pencapaian kinerja.
8. Memastikan adanya standar kompetensi jabatan agar penempatan PNS sesuai.
9. Pemberian Izin Belajar untuk memenuhi kompetensi guru agar dapat memenuhi syarat kompetensi dan mengusulkan sertifikasi.

**Misi 5 : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim**

Misi kelima ini dijabarkan dalam 1 tujuan dan 2 sasaran. Tujuan tersebut adalah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan dua sasaran diantaranya adalah (1) Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup, (2) Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca.

Capaian sasaran misi 5 pada tahun 2017 untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim dengan pola pembangunan Kalimantan Timur yang masih mengekstrasi sumber daya alam, yang kita sadari adanya potensi penurunan pada kualitas lingkungan (baik untuk media air, lahan dan udara) yang terjadi. Gambaran secara umum untuk pencapaian kinerja Pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Timur sebesar 82,64, atau dikategorikan sangat baik. Adapun parameter yang berpengaruh terhadap indeks ini adalah parameter kualitas sungai dan kualitas udara yang telah dilakukan pemantauan di Kabupaten/Kota serta parameter tutupan lahan dan hutan di Kalimantan Timur. Untuk itu Pemerintah perlu melakukan penguatan sistem pemantauan dan sistem informasi untuk pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 4.16**  
**Capaian Sasaran Misi 5 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,14	82,64	On Track/ Tercapai	
2.	Intensitas Emisi	1.800	1.515	On Track/ Tercapai	

*Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur data tahun 2017, data SKPD*

Disisi lain, deforestasi dan degradasi hutan masih menjadi salah satu sumber emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Pada periode 2000 – 2011, rata-rata deforestasi pertahun adalah 62.985 ha dan degradasi 56.701 ha. Dari upaya mitigasi emisi gas rumah kaca yang dilaksanakan LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2017

sejak tahun 2012 untuk sektor ini, laju rata-rata laju deforestasi dapat ditekan menjadi 32.795 ha per tahun dan rata-rata laju degradasi hutan menjadi 13.395 ha per tahunnya.

Saat ini intensitas emisi Kalimantan Timur mencapai 1.515 Ton CO<sub>2</sub>eq/Juta \$ PDRB dan telah mencapai target untuk penurunan intensitas emisi sebesar 1.800 Ton CO<sub>2</sub>eq/Juta \$ PDRB yang ditetapkan pada tahun 2017.

Strategi Pembangunan Kalimantan Timur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan telah dibuat dan telah mewarnai kebijakan dan arah pembangunan daerah, demikian pula strategi dan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca telah dihasilkan dan dilaksanakan dimana strategi pembangunan tersebut memastikan pembangunan ekonomi dan pengurangan emisi dikuatkan dan dilaksanakan secara bersama. Bagi Kalimantan Timur yang sedang membangun, strategi yang dipilih adalah menciptakan dan mendorong pertumbuhan sektor yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tambah tinggi namun disisi lain menghasilkan emisi yang rendah.

Dalam rangka mendukung penurunan intensitas emisi telah dilakukan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah antara lain :

- Melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Melalui penerbitan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
- Melalui penerbitan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang PROPER HPH/HTI;
- Melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2012 tentang PROPER industri/jasa/pabrik kelapa sawit;
- Melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2015 tentang PROPER pertambangan batubara;
- Melalui penerbitan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang penataan pemberian izin & non perizinan serta

penyempurnaan tata kelola perizinan di sektor pertambangan, kehutanan & perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kaltim;

- Dalam rangka penataan penguatan pelaksanaan moratorium penerbitan izin tambang dan lahan gambut, melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur tentang penundaan ijin pertambangan;
- Kegiatan One Man Five Trees sejak 2011 sampai tahun 2017 ini sebanyak 422.041.456 batang pohon.

Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim diupayakan melalui pencapaian Prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

## 5.1. Prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

### 5.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

#### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan dilaksanakan melalui 10 program dan 22 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5,27 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah indeks kualitas lingkungan 82,64 telah melampaui target 81,14 dan intensitas emisi 1.515 ton CO<sub>2</sub>/PDRB US\$ juta yang lebih baik dari target 1.800 ton CO<sub>2</sub>/PDRB US\$ juta.

**Tabel 4.17**  
**Program Kegiatan Prioritas**  
**terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

PRIORITAS 12 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
NO		PROGRAM / KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dan Perumahan Rakyat
	1.1	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	
	1.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	
	1.3	Survey dan pemetaan pemanfaatan ruang	
	1.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	

	1.5	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	
2	<b>Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>		<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
	2.1	Penilaian Proper Sektor Pertambangan Batubara	
	2.2	Penilaian Proper Sektor Industri, Jasa dan Kelapa Sawit	
	2.3	Penilaian Proper HPH dan HTI	
3	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>		
4	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>		
	4.1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
	4.2	Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah	
	4.3	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan	
5	<b>Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH</b>		
	5.1	Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim)	
	5.2	Penilaian dan Pemberian Penghargaan LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim)	
	5.3	Identifikasi, verifikasi dan validasi serta Penetapan Pengakuan Keberadaan Masyarakat hukum adat terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH	
6	<b>Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH</b>		
7	<b>Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup</b>		
	7.1	Pengembangan SDM Pengelolaan LH	
8	<b>Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>BAPPEDA</b>
	8.1	Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca	
	8.2	Koordinasi penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota	
9	<b>Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim</b>		<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
	9.1	Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
	9.2	Perlindungan Lapisan Ozon	
	9.3	Pengembangan sistem Measurement, Evaluation and Verification (MRV) RAD - GRK	
	9.4	Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD - GRK	
10	<b>Inventarisasi emisi gas rumah kaca</b>		

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas "Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" pada tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 83,24% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 85,55%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian peningkatan kualitas lingkungan hidup, adalah sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan penataan ruang, melalui kegiatan :
  - Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL berupa penetapan delineasi Kawasan Industri Oleochemical (KIO) Maloy dan dokumen persiapan persetujuan substansi RTR KIO Maloy.
  - Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang berupa pemahaman pemangku kepentingan terkait perencanaan tata ruang sebanyak 114 orang; Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang RTRWP Kaltim 2016-2036 dan rencana peninjauan kembali RTRWP; Operasionalisasi SIMTARU sebagai alat publikasi data dan informasi penataan ruang.
  - Survey dan pemetaan pemanfaatan ruang berupa terkoreksinya data citra satelit sebagai database spasial dalam perencanaan rinci tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Kota Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur serta Peta Pemanfaatan Ruang Kaltim.
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan tata ruang berupa dokumen pemenuhan SPM bidang penataan ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang; Kajian awal peninjauan kembali RTRW Provinsi; Pengawasan teknis penyelenggaraan pemanfaatan ruang.

- Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota berupa operasionalisasi dan koordinasi pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, melalui kegiatan;
    - Penilaian proper sektor pertambangan batubara berupa pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup di sektor pertambangan batubara sebanyak 83 perusahaan.
    - Penilaian Proper Sektor Industri, Jasa dan Kelapa Sawit berupa pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup di sektor industri dan jasa sebanyak 106 perusahaan.
    - Penilaian Proper HPH dan HTI berupa pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup di sektor HPH dan HTI sebanyak 16 perusahaan.
  3. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan LH.  
 Pada tahun 2017, program ini direvisi menjadi program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, melalui kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi berupa pembuatan laporan hasil perhitungan beban pencemaran.
  4. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, melalui kegiatan :
    - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan berupa pembinaan/sosialisasi tentang pengelolaan persampahan sebanyak 65 orang peserta.
    - Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah berupa penyusunan draft Peraturan Gubernur tentang pengelolaan sampah dalam rangka mendukung pengelolaan sampah regional.
    - Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan berupa kerjasama/Mou antara Kecamatan Samboja dengan PT. Singlurus.

5. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, melalui kegiatan :
  - Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim) sebanyak 20 orang.
  - Penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim) berupa penilaian apresiasi terhadap lingkungan hidup yang diberikan kepada 1 tokoh Kalpataru; 2 Kabupaten/Kota Adipura; dan 40 sekolah.
  - Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa inventarisasi pendataan terhadap keberadaan MHA di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.
6. Program peningkatan edukasi dan komunikasi publik tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2017 telah direvisi dan tidak dilaksanakan.
7. Program pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui kegiatan pengembangan SDM pengelolaan lingkungan hidup kepada 40 orang/ASN.
8. Program pengarusutamaan perubahan iklim dan green ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah, melalui kegiatan :
  - Pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca berupa pembentukan pokja pembangunan ekonomi hijau di 2 Kabupaten.
  - Koordinasi penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kabupaten/Kota.
9. Program perlindungan atmosfer dan perubahan iklim, melalui kegiatan :

- Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berupa upaya mitigasi perubahan iklim sebesar 1.515 ton CO<sub>2</sub> eq/1 juta US\$
  - Perlindungan lapisan ozon berupa inventarisasi bahan perusak ozon di 3 Kabupaten/Kota (Samarinda, Balikpapan dan Kukar).
  - Pengembangan sistem Measurement, Evaluation and Verification (MRV) RAD - GRK berupa pengembangan sistem measurement, evaluation dan verification (MRV) RAD GRK.
  - Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan RAD - GRK berupa mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (pelaksanaan pemantauan evaluasi & pelaporan RAD GRK). dan inventarisasi emisi gas rumah kaca.
10. Program inventarisasi emisi gas rumah kaca.
- Pada tahun 2017, pelaksanaan program ini direvisi dan mengalami penyesuaian. Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan RAD - GRK.

### **5.1.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Terdapat Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan kebijakan Nasional yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur serta ketidaksesuaian dengan Perda RTRW Kabupaten/Kota, khususnya yang sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi Perda sebelum diterbitkannya Perda RTRW Provinsi.
2. Belum adanya Perda mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP).
3. Kabupaten yang belum memiliki Perda RTRW, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, serta hampir 90% Kabupaten/Kota masih belum

menetapkan Perda mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTR KSK) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.

4. Terdapat ketidaksesuaian Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Pertambangan.
5. Belum adanya peraturan operasionalisasi RTRWP terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan karst.
6. Belum adanya kebijakan operasionalisasi RTRWP tentang peraturan zonasi, insentif dan dis-insentif serta sanksi administratif untuk pelanggaran pemanfaatan ruang.
7. Penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan karena inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan.
8. Keterbatasan SDM pengawas lingkungan hidup baik jumlah maupun kompetensinya.
9. Kurangnya pelatihan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Tenaga Pengendalian Dampak Lingkungan (PEDAL)).
10. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memilah jenis sampah.
11. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
12. Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di setiap Kabupaten/Kota.

**b. Solusi**

1. Sinkronisasi Perda RTRWP terhadap NSPK Bidang Penataan Ruang dan Kebijakan Nasional serta Perda RTRW Kabupaten/Kota sebagai bahan masukan bagi peninjauan

kembali RTRW Provinsi Kalimantan Timur sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

2. Perlu dilakukan percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSP sesuai indikasi program RTRW Provinsi Kalimantan Timur.
3. Perlu dilakukan upaya percepatan penyusunan RTRW/RTR KSK/RDTR, baik dengan konsultasi antar Pemerintah, bantuan teknis, sosialisasi dan pelatihan, dan lain-lain.
4. Melakukan kajian terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan dengan potensi karst untuk kemudian ditetapkan dengan Pergub sebagai upaya perlindungannya.
5. Perlu dilakukan kajian kembali mengenai Pergub Nomor 35 Tahun 2017 sebagai salah satu kebijakan operasionalisasi RTRW Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perlu dilakukan penyusunan Pergub mengenai peraturan zonasi, insentif dan dis-insentif serta sanksi administratif untuk pelanggaran pemanfaatan ruang sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang Kalimantan Timur sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Pentingnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas sebagai pengawas pemanfaatan ruang, yaitu dengan mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang dan menyusun serta mengimplementasikan Pergub mengenai peraturan zonasi, insentif dan dis-insentif serta sanksi atas pelanggaran/ penyimpangan pemanfaatan ruang.
8. Melakukan pelatihan/kursus/bimbingan teknis kepada SDM pengelola lingkungan dan aparatur di dinas lingkungan hidup.
9. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan kepada dunia usaha.
10. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah

11. Mencari sumber pendanaan lain selain APBD untuk pengelolaan lingkungan serta pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

12. Pembangunan TPA Sanitasi Land Fill di semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

## **B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan**

**Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan**

### **1.1. Prioritas 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan**

#### **1.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

##### **a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan seluruh program yang berada pada prioritas ini telah direvisi dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Capaian prioritas ini adalah tingkat kemiskinan 6,19% dari target 6,10%.

**Tabel 4.18.**  
**Program Kegiatan Prioritas**  
**terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan**

<b>Prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan</b>		
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN</b>	<b>DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN &amp; HORTIKULTURA</b>
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG PETERNAKAN</b>	<b>DINAS PETERNAKAN &amp; KESEHATAN HEWAN</b>

*Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017*

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas "Percepatan Pengentasan Kemiskinan" pada tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi 0%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian percepatan pengentasan kemiskinan, adalah sebagai berikut :

1. Program penanggulangan kemiskinan bidang kehutanan.

Pada tahun 2017, program ini telah direvisi dan menyesuaikan dengan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga tidak dilaksanakan.

2. Program penanggulangan kemiskinan bidang pertanian tanaman.

Pada tahun 2016, program ini dilaksanakan melalui kegiatan Demplot Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) yang berupa bantuan paket saprodi (Benih padi, cabe, kacang panjang, terong, timun, jagung manis, bibit itik alabio, pakan itik, jaring pengaman kandang, pupuk Urea, NPK, pestisida, herbisida, pupuk organik dan kapur procal), alat dan mesin pertanian (hand traktor dan power thresher), jalan pertanian dan optimasi jaringan irigasi. Dan pada tahun 2017, program ini direvisi dan tidak dilaksanakan.

3. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan.

Pada tahun 2016, program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Keterampilan Pengembangan Budidaya Ternak berupa 150 KK untuk budidaya ternak kambing yang tersebar di Kec. Babulu, Kec. Rantau Pulung dan Kec. Bengalon. Dan pada tahun 2017, program ini direvisi dan tidak dilaksanakan.

### 1.1.2. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

Tidak adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan program pada Dinas Kehutanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam upaya pencapaian prioritas 3 (percepatan pengentasan kemiskinan) dikarenakan penyesuaian terhadap PP Nomor 16 Tahun 2016.

#### b. Solusi

Mengupayakan pendanaan di bidang kehutanan, pertanian dan tanaman pangan serta peternakan dalam rangka dukungan pencapaian prioritas 3 (percepatan pengentasan kemiskinan) melalui sumber dana APBN (Pemerintah Pusat).

### 1.2. Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

#### 1.2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaannya

##### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 5: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dilaksanakan melalui 1 program dan 2 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,15 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah pendapatan per kapita Rp 50,65 juta telah mencapai target Rp 52,65 juta dan paritas daya beli Rp 11.355 dari target Rp 11.600, namun masih berada pada status on track.

**Tabel 4.19**  
**Program Kegiatan Prioritas**  
**terkait Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan			
No		Program / Kegiatan	PERANGKAT DAERAH
1	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	1.1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	
	1.2	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas "Pengembangan Ekonomi Kerakyatan" pada tahun 2017 mencapai realisasi keuangan 99,52% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian pengembangan ekonomi kerakyatan, adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, melalui kegiatan :
  - Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk melalui kegiatan bazar/pasar murah sebanyak 70 pasar.
  - Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan berupa Sistem Informasi Manajemen Perdagangan Dalam Negeri.

#### **1.2.2. Permasalahan dan Solusi**

##### **a. Permasalahan**

1. Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting kurang lancar terutama di wilayah pedalaman/perbatasan.
2. Kebutuhan barang pokok dan barang penting sebagian besar masih dipasok dari luar daerah dan tidak semua Kabupaten/Kota memiliki pasar dan gudang barang kebutuhan pokok yang layak.
3. Tingginya harga barang kebutuhan pokok dan penting masyarakat dan disparitas harga antar Kabupaten/Kota terutama menjelang Hari-hari Besar Keagamaan.
4. Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
5. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi harga dan stok barang pokok dan penting masyarakat dari Kabupaten/Kota.
6. Belum optimalnya perlindungan konsumen di Kabupaten/Kota sehingga masih ditemukan barang-barang yang beredar yang

tidak layak jual dan tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti SNI dan kadaluarsa.

**b. Solusi**

1. Melakukan koordinasi dengan distributor dan Dinas Kabupaten/Kota.
2. Melakukan operasi pasar dan pasar murah serta melakukan pemantauan harga secara teratur dan kontinyu di beberapa Kabupaten/Kota.
3. Masih terus diupayakan dengan Kabupaten/Kota untuk membentuk BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
4. Menyediakan sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri.
5. Melakukan upaya perlindungan konsumen melalui sosialisasi dan pengawasan barang beredar/Jasa.

**1.3. Prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi**

**1.3.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

**a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 6 : Transformasi Ekonomi dilaksanakan melalui 8 program dan 12 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2,217 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah pertumbuhan ekonomi dengan migas 3,13% yang telah mencapai target  $0,5 \pm 1$ ; pertumbuhan ekonomi dengan non migas 4,04% yang tidak mencapai target  $1 \pm 1$ ; dan pertumbuhan ekonomi dengan non migas dan non batubara 5,24% yang telah mencapai target  $4 \pm 1$ .

**Tabel 4.20**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Transformasi Ekonomi**

<b>Prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi</b>		
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI HULU - HILIR</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>

2	PROGRAM PERLUASAN KEBUN SAWIT		DINAS PERKEBUNAN
3	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI		DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN		DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
	4.1	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	
	4.2	Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	
	4.3	Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK-PRODUK PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH		DINAS PERKEBUNAN
6	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL		DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	6.1	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan	
7	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR		
	7.1	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PARIWISATA DERAWAN		DINAS PARIWISATA
9	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA		
	9.1	Pengembangan, Peningkatan Infrastruktur dan Ekosistem	
	9.2	Pengembangan Wisata Alam, dan Buatan	
	9.3	Pengembangan Wisata Bahari dan Minat Khusus	
10	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHAN NON MIGAS		DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Transformasi Ekonomi” pada tahun

2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 99,59% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 99,89%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian transformasi ekonomi, adalah sebagai berikut :

1. Penataan struktur industri hulu – hilir.

Pada tahun 2017, pelaksanaan program ini direvisi dan mengalami penyesuaian dengan lebih menegaskan pada penataan industri dari hulu ke hilir. Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan keterkaitan produksi industri Hulu hingga ke hilir berupa penyusunan rencana pengembangan industri daerah, FGD Penyusunan RPIP dan KEK MBTK; dan pengembangan sistem data dan informasi industri daerah.

2. Perluasan kebun sawit.

Pada tahun 2016, program ini dilaksanakan melalui kegiatan ekstensifikasi perkebunan sawit dengan total luas keseluruhan 750 Ha yang terbagi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Barat dan Berau; Pelatihan Pengembangan Kelapa Sawit sebanyak 204 orang (rantau pulung 78 petani, Babulu 22 petani, sambaliung 26 petani, bengalon 30 petani, loa kulu 28 petani, kubar 20 petani); Sosialisasi perluasan areal kelapa sawit sebanyak 122 orang. Dan pada tahun 2017, program ini direvisi dan tidak dilaksanakan.

3. Peningkatan kemampuan teknologi industri. Dan pada tahun 2017, program ini direvisi dan tidak dilaksanakan.

4. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, melalui kegiatan :

- Peningkatan mutu produk olahan peternakan berupa pelatihan pengolahan hasil peternakan sebanyak 10 orang; dan pendampingan 1 unit usaha pengolahan hasil peternakan.

- Peningkatan pemasaran hasil peternakan berupa promosi pembangunan peternakan; penyusunan informasi harga komoditas peternakan.
  - Peningkatan jaminan keamanan pangan asal ternak berupa 6 sertifikat NKV yang diterbitkan; serta penanganan 98 kasus cemaran mikroba.
5. Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah.  
 Pada tahun 2017, program ini telah direvisi dan menyesuaikan dengan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Namun dalam pelaksanaannya, pencapaian terhadap target prioritas ini tetap didukung dengan program peningkatan nilai tambah produk perkebunan berupa pelatihan pembinaan pengolahan produk perkebunan dan program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan berupa promosi hasil produksi perkebunan.
6. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional melalui kegiatan koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan berupa 11 UKM yang melakukan promosi.
7. Peningkatan dan pengembangan ekspor, melalui kegiatan pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri berupa eksportir yang mendapatkan informasi pasar produk ekspor kalim sebanyak 20 perusahaan.
8. Pengembangan kawasan industri pariwisata derawan. Dan pada tahun 2017, program ini direvisi dan tidak dilaksanakan.
9. Pengembangan destinasi pariwisata, melalui kegiatan :
- Pengembangan, peningkatan infrastruktur dan ekosistem berupa pembuatan papan informasi obyek wisata di 4 Kabupaten/Kota yaitu Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara; Pemasangan baliho/poster destinasi unggulan di 10 Kabupaten/Kota; Pembentukan tim terpadu lintas sektor pariwisata yang terdiri dari mitra kerja pariwisata (PHRI, ASITA), akademisi

(Jurusan Pariwisata POLNES), dan beberapa instansi terkait seperti Dinas PU Prov. Kaltim, Dishub Prov. Kaltim, Dishut Prov. Kaltim, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim dan Biro Infrastruktur & SDA Setda Prov. Kaltim.

- Pengembangan wisata alam, dan buatan berupa wisata Remaja ke Kota Balikpapan dengan melibatkan remaja dalam hal ini 10 orang mahasiswa Universitas Mulawarman; Exploring Pesona Kalimantan Timur dengan melibatkan 75 orang di 3 obyek wisata yaitu Museum Gunung Tabur – Berau, KWPLH Beruang Madu – Balikpapan, dan Taman Budaya Sendawar – Kutai Barat.
- Pengembangan wisata bahari dan minat khusus berupa bimtek optimalisasi pengembangan potensi wisata bahari dan minat khusus dengan peserta sebanyak 20 orang dari 10 Kabupaten/Kota; Jungle Tracking ke Kabupaten Mahakam Ulu dengan melibatkan beberapa jurnalis media cetak dan elektronik.

#### 10. Peningkatan dan pengembangan industri olahan non migas.

Pada tahun 2017, pelaksanaan program ini direvisi dan mengalami penyesuaian menjadi program peningkatan dan pengembangan industri yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi peningkatan dan pengembangan industri dan peningkatan pelayanan ijin usaha industri.

### 1.3.2. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan hilirisasi pada industri pengolahan.

2. Belum maksimalnya networking pasar luar negeri.
3. Masih rendahnya pemanfaatan informasi/akses pasar luar negeri.
4. Terbatasnya kemampuan SDM UKM dalam mengolah dan mengembangkan produk untuk ekspor.
5. Rendahnya daya saing produk ekspor yang terbaharui.
6. Rendahnya daya saing pelaku usaha kaltim dengan daerah lain baik dari aspek kualitas komoditi maupun kuantitas.
7. Tidak stabilnya permintaan negara tujuan ekspor dan tidak stabilnya harga pasar internasional.
8. Adanya kasus pemalsuan daging di Kaltim.
9. Masih rendahnya peran serta masyarakat/pelaku usaha dalam penerapan higienies sanitasi pangan asal hewan.
10. Banyaknya potensi pariwisata atau obyek wisata didaerah yang belum ditunjang dengan kuantitas dan kualitas aksesibilitas (jalan), amenities (sarana dan prasarana), dan atraksi yang baik sehingga belum mampu menarik banyak kunjungan wisatawan dari luar Kalimantan Timur.
11. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi.
12. Masih rendahnya daya saing unit bisnis kepariwisataan terutama menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata dan budaya, sumber daya manusia, dan pemasaran. Hal ini memberikan implikasi pada lama tinggal (length of stay) dan pengeluaran wisatawan (tourist expenditure) di Provinsi Kalimantan Timur.

#### **b. Solusi**

1. Untuk mewujudkan hilirisasi industri yang optimal perlu diarahkan pada :

- a. Industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra – sentra produksi bahan baku serta lingkungan dan sarana penunjangnya.
  - b. Penguatan dan meningkatkan kinerja industri pengolahan skala UKM/IKM yang didukung oleh industri pengolahan skala besar.
  - c. Pengembangan industri berbasis komoditas unggulan yang mampu meningkatkan nilai tambah, peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja serta daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan.
2. Pembinaan industri terutama yang terkait dengan teknologi proses produksi dan manajemen usaha.
  3. Adanya dukungan dan peran Pemerintah yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan program tertulis dalam mendorong percepatan hilirisasi industri pengolahan serta fasilitasi yang mampu meningkatkan jaringan kerjasama yang menguntungkan pelaku industri.
  4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program pembinaan baik antar perangkat daerah maupun kelembagaan lain.
  5. Mendorong percepatan pengembangan kawasan industri di Kalimantan Timur.
  6. Percepatan dan peningkatan sarana dan prasarana industri yang memadai terutama di Kabupaten/Kota.
  7. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalan potensi ekspor di Kabupaten/Kota.
  8. Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui program misi dagang dan promosi/pameran di dalam dan luar negeri serta pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.
  9. Sosialisasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan public awareness dalam penanganan Pangan Asal Hewan (PAH) yang higienis.

10. Koordinasi dengan stakeholder/instansi dalam peningkatan higienis dan sanitasi Pangan Asal Hewan (PAH), khususnya pada tataniaga/penjualan bahan pangan asal hewan.
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aksesibilitas menuju lokasi potensi pariwisata atau obyek wisata, amenitas dan atraksi di obyek wisata sehingga dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi Kalimantan Timur dan mampu bersaing dengan potensi pariwisata/obyek wisata di luar Kalimantan Timur.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia melalui pembinaan, pelatihan baik terhadap aparatur, masyarakat sekitar destinasi wisata dan lembaga pendidikan pariwisata sehingga SDM pariwisata Kalimantan Timur dapat menunjang kualitas pariwisata di Kalimantan Timur.
13. Meningkatkan daya saing unit bisnis kepariwisataan melalui workshop manajemen produk sehingga banyak bermunculan pengusaha/pengrajin yang kreatif serta menyediakan lebih banyak atraksi pariwisata dan budaya akan mendorong peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.

#### **1.4. Prioritas 7 : Pengembangan Agribisnis**

##### **1.4.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

###### **a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 7: Pengembangan Agribisnis dilaksanakan melalui melalui 5 program dan 11 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18,848 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah kontribusi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 7,96% telah mencapai target 9,00%.

**Tabel 4.21**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Pengembangan Agribisnis**

<b>Prioritas 7 : Pengembangan Agribisnis</b>		
<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN</b>	<b>DINAS PETERNAKAN &amp;</b>

	1.1	Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan	KESEHATAN HEWAN
	1.2	Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	
	1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU, DAN AIR TAWAR		DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP		
	3.1	Kegiatan Pengelolaan kenelayanan	
	3.2	Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan	
	3.3	Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana Perikanan dan Pelabuhan Perikanan	
	3.4	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili Samarinda (DAK)	DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI PERTANIAN		
5	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI		
	5.1	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Pengembangan Agribisnis” pada tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 80,23% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 80,81%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian Pengembangan Agribisnis, adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan produksi hasil peternakan, melalui kegiatan :
  - Pengembangan perbibitan dan inseminasi buatan berupa 50 ekor ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit), 30 KK peternak pembibit, 5.656 ekor akseptor IB;
  - Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna berupa Inventarisasi alat mesin peternakan (Alsinnak);

- Peningkatan kapasitas kelembagaan peternak berupa 3 profil kelompok ternak dan buku induk ternak.
2. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar.

Pada tahun 2017, program ini telah direvisi menjadi kegiatan yang berada pada program pengembangan produksi budidaya dan penguatan daya saing produk perikanan yang pelaksanaannya berupa pengembangan 1 kawasan budidaya laut, payau dan air tawar, rekomendasi penerbitan surat ijin usaha perikanan budidaya dan pengolahan (SIUP) dan surat izin kapal pengangkut ikan hidup (SIKPI), 10 UKM pengolahan hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan dan sertifikasi.

3. Program pengembangan perikanan tangkap, melalui kegiatan:
- Pengelolaan kenelayanan kepada 27 Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap yang dibina.
  - Pengendalian penangkapan ikan berupa perizinan kapal ikan sebanyak 225 izin.
  - Kegiatan peningkatan sarana, prasarana perikanan dan pelabuhan perikanan sebanyak 6 unit pangkalan pendaratan ikan yang operasional.
  - Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili Samarinda (DAK) sebanyak 2 unit prasarana PPI.

4. Program pengembangan kawasan produksi pertanian.

Pada tahun 2017, program ini telah direvisi. Namun dalam pelaksanaannya, pencapaian terhadap target prioritas ini tetap didukung melalui pelaksanaan program panganekaragaman konsumsi pangan berupa kegiatan pengembangan kawasan rumah pangan lestari di 10 Kabupaten/Kota.

5. Program peningkatan kesejahteraan petani, melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis kepada 16 orang penyuluh, petani dan pelaku agribisnis.

#### 1.4.2. Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

1. Armada kapal perikanan tangkap masih di dominasi kapal-kapal dengan ukuran 5-10 GT, sehingga belum dapat memanfaatkan secara maksimal potensi produksi perikanan tangkap.
2. Masih terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
3. SDM Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) semakin berkurang jumlahnya karna tidak ada pengangkatan untuk pengganti PPL yang telah purna tugas.

##### b. Solusi

1. Pengadaan armada kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 30 GT.
2. Penggantian alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dengan yang ramah lingkungan.
3. Perlunya pengangkatan PPL dan THL – TB (Non PNS) atau penyuluh swadaya yang berasal dari petani maju/kontak tani nelayan andalan.

#### 1.5. Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan

##### 1.5.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

##### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan dilaksanakan melalui 4 program dan 6 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,042 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah rasio pemenuhan beras 61,52% akan mencapai target 75%.

**Tabel 4.22**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Peningkatan Produksi Pangan**

Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan		
NO	PROGRAM / KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
1	PROGRAM PERLUASAN KOMODITAS PERKEBUNAN NON SAWIT	DINAS PERKEBUNAN

	1.1	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN DAN USAHA PETERNAKAN</b>		<b>DINAS PETERNAKAN &amp; KESEHATAN HEWAN</b>
	2.1	Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Produksi Pakan Ternak	
	2.2	Pengembangan Informasi Peternakan	
	2.3	Pengembangan Agribisnis Peternakan	
<b>3</b>	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN</b>		<b>DINAS KELAUTAN &amp; PERIKANAN</b>
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI</b>		<b>DINAS TENAGA KERJA &amp; TRANSMIGRASI</b>
	4.1	Sinkronisasi dan Integrasi Rencana Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Produksi Pangan” pada tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 94,12% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 97,99%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian Peningkatan Produksi Pangan, adalah sebagai berikut :

1. Program perluasan komoditas perkebunan non sawit melalui kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan berupa perluasan areal karet seluas 20 Ha di Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (bibit karet 10.000 batang, pupuk npk 2.000 kg, herbisida 100 liter).
2. Program pengembangan kawasan dan usaha peternakan, melalui kegiatan :
  - Pengembangan kawasan dan peningkatan produksi pakan ternak berupa kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) seluas 960 ha; padang penggembalaan seluas 475 ha; 5 kecamatan kawasan peternakan; dan penyusunan profil kawasan peternakan.

- Pengembangan informasi peternakan berupa 60 publikasi berita peternakan melalui elektronik; penyusunan database, statistik peternakan, NBM dan data fungsi peternakan.
  - Pengembangan agribisnis peternakan kepada 68 orang mitra perunggasan; 2 kelompok sosialisasi asuransi ternak; dan 49 orang peternak yang mengikuti Kredit Ternak Sejahtera (KTS).
3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- Pada tahun 2017, program ini telah direvisi menjadi kegiatan yang berada pada program pengembangan produksi budidaya dan penguatan daya saing produk perikanan yang pelaksanaannya berupa kegiatan pemasaran produksi perikanan.
4. Program pengembangan wilayah transmigrasi, melalui kegiatan sinkronisasi dan integrasi rencana kawasan transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berupa penyusunan Rencana Kerja Kawasan Transmigrasi (RKT) di 6 lokasi yaitu Kecamatan Maratua (Kabupaten Berau), Kecamatan Kerang (Kabupaten Paser), Kecamatan Long Apari, Long Pahangai dan Long Bagun (Kabupaten Mahakam Ulu), Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur).

### **1.5.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Secara teknis maupun non teknis, kegiatan perluasan areal karet tidak mengalami kendala. Permasalahan yang ada di dalam komoditi karet adalah harga karet yang tidak stabil. Selain itu, mutu karet dari petani juga rendah yang dapat mempengaruhi harga jual ke industri.
2. Pola pelaporan untuk data kemitraan perunggasan belum optimal.

3. Jaminan/agunan yang dimiliki petani seringkali tidak memenuhi persyaratan dari perbankan.

**b. Solusi**

1. Untuk meningkatkan pengetahuan petani terhadap standar mutu Bahan Olah Karet (BOKAR), pada tahun 2017 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pelatihan pengolahan produk perkebunan komoditi karet (BOKAR) kepada kelompok tani yang ada di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
2. Meningkatkan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyediaan data kemitraan perunggasan.
3. Mendorong petani untuk dapat melakukan balik nama surat/agunan sebagai syarat permodalan dari Bank.

**1.6. Prioritas 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan**

**1.6.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

**a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 9: Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan dilaksanakan 3 program dan 7 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33,401 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah bauran energi baru terbarukan 1,38%.

**Tabel 4.23**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait**  
**Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan**

<b>Prioritas 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan</b>		
<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM DIVERSIFIKASI ENERGI</b>	<b>DINAS ENERGI &amp; SUMBER DAYA MINERAL</b>
1.1	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	
1.2	Energi Skala Kecil (DAK)	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN</b>	<b>DINAS PETERNAKAN &amp; KESEHATAN HEWAN</b>

3	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>DINAS ENERGI &amp; SUMBER DAYA MINERAL</b>
4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LISTRIK PEDESAAN</b>	

*Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017*

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan” pada tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 94,37% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 95,04%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan, adalah sebagai berikut :

1. Program diversifikasi energi, melalui kegiatan :
  - Pengembangan energi baru dan terbarukan berupa monitoring Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Kabupaten Berau, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur dan Paser.
  - Energi skala kecil (DAK) berupa pembangunan PLTS Terpusat di Kabupaten Paser sebanyak 1 unit sebesar 64 kWp, Kab. Kubar sebanyak 2 unit sebesar 77,2 kWp dan Kab. Berau sebanyak 2 unit sebesar 53 kWp; Pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga dengan jumlah 41 unit di Kabupaten PPU Kecamatan Sepaku Desa Suko Mulyo sebanyak 21 unit, Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Kota Bangun Desa Sari Nadi sebanyak 5 unit, Desa Suka Bumi sebanyak 4 Unit, Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Linggang Bigung Desa Bangun Sari sebanyak 11 unit.
2. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
 

Pada tahun 2017, program ini telah direvisi menjadi kegiatan yang berada pada program peningkatan produksi peternakan yang pelaksanaannya berupa kegiatan pengembangan teknologi peternakan tepat guna yang dijalankan pada prioritas 7 pengembangan agribisnis.

3. Program peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan program pengembangan listrik pedesaan pada tahun 2017 telah direvisi dan tidak dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya, pencapaian terhadap target prioritas ini tetap didukung dengan program pengembangan ketenagalistrikan berupa evaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) perusahaan ketenagalistrikan wilayah usaha Kaltim; dan pelaksanaan program diversifikasi energi yang dijalankan pada prioritas yang sama.

### **1.6.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

Pengembangan Desa berlistrik pada umumnya melalui perluasan jaringan listrik di pedesaan/perbatasan dengan penggunaan EBT skala kecil (PLTS Terpusat dan PLTMH) sering terkendala dengan akses dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta biaya pembangunannya cukup besar, sementara saat ini dana pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan EBT sangat terbatas.

#### **b. Solusi**

1. Tersedianya dana yang memadai untuk kegiatan pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan EBT.
2. Mengusulkan dana kegiatan EBT melalui DAK ke Pemerintah Pusat, serta mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dibidang ketenagalistrikan yang bersumber dari EBT.

### **Misi 5 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim**

#### **1.7. Prioritas 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

##### **1.7.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaannya**

##### **a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan

melalui 3 program dan 4 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.157,67 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah indeks kualitas lingkungan 82,64% mencapai target 81,99% dan intensitas emisi 1.515 ton CO<sub>2</sub>/PDRB US\$ juta sudah melampaui target 1.800 ton CO<sub>2</sub>/PDRB US\$ juta.

**Tabel 4.24**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Peningkatan**  
**Kualitas Lingkungan Hidup**

<b>PRIORITAS 12 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		
<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
1	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH</b>	<b>Dinas Kehutanan</b>
2	<b>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	
3	<b>Program Rehabilitasi Hutan Mangrove</b>	
4	<b>Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi</b>	
5	<b>Program Rehabilitasi Reklamasi lahan Pasca Tambang</b>	<b>Dinas Energi &amp; Sumber Daya Mineral</b>
	5.1 Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Reklamasi	
6	<b>Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan</b>	<b>Dinas Perkebunan</b>

*Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2017*

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” pada tahun 2017 rata-rata mencapai realisasi keuangan 0,32% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 0,37%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam upaya pencapaian peningkatan kualitas lingkungan hidup, adalah sebagai berikut :

1. Program pengelolaan dan pengembangan KPH.

Sesuai dengan perencanaan pada RPJMD tahun 2013 – 2018, program ini hanya dijalankan sampai dengan akhir tahun 2016.

2. Program pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi; program rehabilitasi hutan mangrove; program rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2017 telah direvisi menjadi program pengelolaan DAS dan RHL dan tidak dapat dilaksanakan.
3. Program rehabilitasi reklamasi lahan pasca tambang, berupa pelaksanaan reklamasi wilayah pertambangan. Adapun luas lahan yang terganggu pada tahun 2017 semula 29.638 Ha meningkat menjadi 98.702,47 Ha dan luas lahan yang direklamasi semula 8.396 Ha mengalami peningkatan menjadi 46.574,56 Ha. Hal tersebut dikarenakan perhitungan luas lahan yang dilakukan sebelumnya hanya berdasarkan pada data perusahaan pemegang IUP dan tidak termasuk data Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sampai pada akhir tahun 2017, wilayah pertambangan yang telah direhabilitasi sebesar 47,19% dari total wilayah yang harus direhabilitasi.
4. Program Pembinaan Perkebunan ramah lingkungan. Pada tahun 2017, program ini direvisi menjadi program konservasi lahan dan air dengan capaian berupa kegiatan monitoring di 120 embung yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Penajam Paser Utara.

### **1.7.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Adanya ketidaksinkronan landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2002 bahwa kegiatan RHL yang dibiayai dari Dana Reboisasi (DR) mencakup

rehabilitasi di dalam kawasan hutan (Reboiasi) dan di luar kawasan hutan (Penghijauan), namun menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2014 disampaikan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi adalah melaksanakan rehabilitasi diluar kawasan hutan. Sehingga terkait program yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR) untuk kegiatan RHL tersebut apabila dilaksanakan dapat menimbulkan dampak hukum dikemudian hari. Dan sampai saat ini peraturan dan petunjuk teknis terkait dengan penggunaan DBH SDA kehutanan tersebut belum diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Terdapat embung yang mengalami kerusakan akibat longsor.
3. Ruang lingkup evaluasi lahan reklamasi masih terkendala dengan penataan perizinan IUP yang telah diterbitkan Kabupaten/Kota (seperti perizinan masih proses, yang dapat diterima, yang sudah ditinggalkan oleh pemeliknya yang sudah habis masa berlakunya), oleh sebab itu tidak semua IUP dapat dilakukan evaluasi.

#### **b. Solusi**

1. Mengingat ketidaksinkronan landasan hukum antara Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 dengan UU No. 23 Tahun 2014 maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 beserta turunannya yaitu Permenhut No. P.14/Menhut-II/2008 jo. P.23/Menhut-II/2010, mengingat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini guna kepentingan kegiatan pembangunan di daerah khususnya daerah provinsi.
2. Perlu diterbitkannya Petunjuk Teknis terbaru dari Kementerian LHK tentang pelaksanaan RHL DBH DR.

3. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan embung secara rutin.
4. Percepatan penataan IUP yang telah diterbitkan oleh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.